

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Kerja magang dilakukan pada perusahaan Kompas Gramedia yang berlokasi di Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, RT.004/RW.002, Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Selama masa kerja magang ditempatkan pada unit fungsional *Corporate Comptroller* tepatnya pada *Accounting, Tax, and Financial System Division* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Proses kerja magang dibimbing oleh Mba Meidy Theana selaku *Tax Analyst*.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Berikut tugas dan uraian *jobdesk* yang dilakukan selama periode kerja magang:

3.2.1 Menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 23 dengan menggunakan BB Desktop.

Bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 23 disediakan dalam bentuk *hardcopy*, kemudian diinput ke dalam *software BB Desktop* untuk menyimpan bukti potong. Karena, bukti potong Wajib Bayar diterbitkan oleh pihak luar sehingga tidak ada di laman DJP online perusahaan, karena itu perusahaan perlu menyimpan bukti potong Wajib Bayar dalam *software BB Desktop*. Selain itu, *BB Desktop* juga menyimpan semua faktur pajak semua unit usaha di Kompas Gramedia. Bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 yang diinput ke *software BB Desktop* dilakukan untuk 32 unit usaha, yaitu untuk PT G, PT KCM, PT KMN, PT SKG dilakukan dalam periode Mei 2024 sampai November 2024 dan bukti potong yang diinput berkisar 120 bukti potong. Kemudian untuk PT GM, PT VCBL, PT IP, PT TDO, PT MMG, PT SMG, PT BM, PT M, PT GMU, PT GPU, PT BSW, PT KIN, PT GAM, PT AIM, PT ASJ, PT T, PT MEN, PT S, PT I, PT BMT, PT JP, PT RS, PT PCN, PT TT, PT YBR, PT GS, PT UB, PT J dilakukan dalam periode Juni 2024 sampai November 2024 dan bukti potong yang diinput berkisar 180 bukti potong. Dokumen yang diperlukan adalah bukti potong PPh Pasal 23 dalam bentuk *hardcopy*.

Berikut langkah-langkah dalam menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 23 pada PT S:

- a. Menerima bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 23 berupa *hardcopy* dari bagian arsip.

The image shows a tax form titled "BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23" from the Indonesian Directorate General of Taxation. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes the tax authority logo and the form number "1500001".
- Identification (A. IDENTITAS WAJIB PAJAK):** Lists NPWP (01.002.003.4-005.006), NIK, and Name (PT S).
- Tax Details (B. PAJAK PENGHASILAN):** Shows tax period (05-2024), date (24-104-02), gross amount (53.000.000), and PPh amount (1.060.000) with a 2% rate.
- Object of Tax (B.7):** "Jasa Manajemen" (Management Services).
- Reference Documents (B.8):** Invoice number 18379, dated 08/04/2024.
- Exemption/Relief (B.9-B.12):** Various checkboxes for tax relief based on SKB, government liability, or other provisions.
- Withholding Taxpayer (C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUTAN PAJAK):** Lists NPWP (10.200.300.4-500.600), Name (PT TIP), Date (17/05/2024), and Name (PT TIP).
- QR Code:** A QR code with the alphanumeric code "MBLDZY3V" below it.

Gambar 3. 1 Bupot Waba PPh Pasal 23 PT S
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 memiliki nomor seri pajak 2000000077, NPWP Wajib Pajak 01.002.003.4-005.006, nama Wajib Pajak PT S, masa pajak Mei 2024, DPP Rp 53.000.000, dengan tarif 2%, PPh yang dipotong sebesar Rp 1.060.000, objek pajak jasa manajemen, NPWP pemotong 10.200.300.4-500.600, nama pemotong PT TIP, tanggal pajak 17 Mei 2024 dan nomor ID Pajak yang tersimpan dalam BB *Desktop* adalah 1500001.

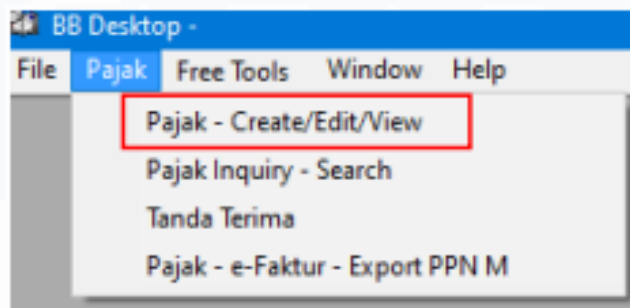
- b. Membuka *software BB Desktop* di komputer kantor, setelah itu *Log On* dengan mengisi “*User ID*” dan “*Password*” Perusahaan.



Gambar 3. 2 *Software BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 2 merupakan tampilan *software BB Desktop* yang akan digunakan untuk penginputan.

- c. Klik menu “Pajak” lalu klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.



Gambar 3. 3 Menu “Pajak” *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 3 merupakan tampilan awal *BB Desktop* yang terdapat menu *File*, *Pajak*, *Free Tools*, *Window*, *Help*. Untuk penginputan bukti potong wajib bayar dilakukan di menu “Pajak” dan klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.

d. Mengisi seluruh informasi pada tampilan tersebut sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Pajak' application window with the following fields and values:

- Pajak ID:** PPh
- Tipe Pajak:** PPh 23 :: PPh 23 :: PPh :: 23
- Unit Usaha:** PT S
- Tanggal Pajak:** 17-May-2024
- Masa Pajak (max 3 bln):** May-2024
- No Seri Pajak:** 2000000077
- Client (Kena Pajak):** PT TIP
- NPWP Client:** 10.200.300.4-500.6000
- NPWP Unit:** 01.002.003.4-005.006

The 'Input Detail Pajak' table is as follows:

Uraian Pajak	Sub Uraian
<None>	<None>
01: Dividen *) (PPh 23)	
02: Bunga **) (PPh 23)	
03: Royalti (PPh 23)	
04: Hadiah dan penghargaan (PPh 23)	
05: Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***) (PPh 23)	
09: a. Jasa Teknik (PPh 23)	
10: b. Jasa Manajemen (PPh 23)	

Gambar 3. 4 Tampilan Setelah Input Bupot Waba PPh Pasal 23 PT S pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 4, maka pengisian untuk bukti potong wajib bayar PPh 23 pada *BB Desktop* adalah sebagai berikut:

1. Klik kolom “Tipe Pajak” lalu pilih “PPh 23”.
2. Centang kolom “Pajak Dari *Client* (WaBa/PPN M)”.
3. Lalu pada kolom “Unit Usaha” isi sesuai unit usaha yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S, masukkan kode perusahaan “***” lalu “Enter”, maka akan secara otomatis terisi “PT S” dan “NPWP Unit” akan terisi “01.002.003.4-005.006”.
4. Lalu pada kolom “Tanggal Pajak” masukkan tanggal “17-May-2024” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S. Lalu pada kolom “Masa Pajak” masukkan masa

- “May-2024” sesuai dengan yang tercantum pada hardcopy bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S.
5. Lalu centang kolom “*Input Manual Data Client* (Pengusaha Kena Pajak)”.
 6. Lalu pada kolom “No Seri Pajak” masukkan nomor “2000000077” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S.
 7. Lalu pada kolom “*Client* (Kena Pajak)” bagian “NPWP *Client*” masukkan “10.200.300.4-500.600” lalu “*Enter*” maka akan secara otomatis terisi nama perusahaan client “PT TIP” dan kolom “*Client Address 1 & 2*” akan secara otomatis terisi.
 8. Lalu pada bagian “Input Detail Pajak” kolom “Uraian Pajak” pilih “10: b. Jasa Manajemen (PPh 23)” lalu pada kolom “Sub Uraian” pilih “None” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S.
- e. Setelah itu pada “Input Detail Pajak” mengisi nilai “Brutto” sebagai berikut:

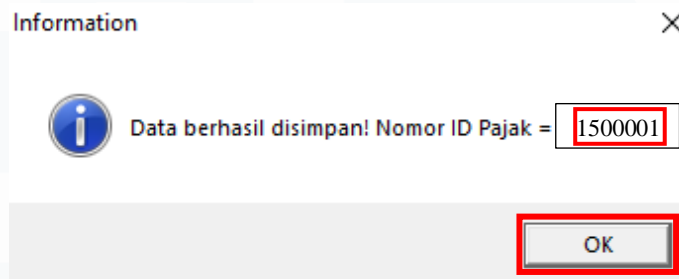
Line_No	Uraian_No	Netto_DPP	Tarif_Pct	Amount_Pajak	Uraian_Pajak	Notes	Brutto	Disc_Rp	Uang_Muka_Rp	Netto_Pct
		53,000,00	0	0	100	53,000,000	2	1,060,00		

Gambar 3. 5 Tampilan Input Detail Pajak pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 5 pada kolom “Brutto” masukkan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 53.000.000, lalu pada kolom tarif akan terisi secara otomatis sebesar “2%” dan pada kolom “Amount Pajak” juga akan secara otomatis terisi sebesar “Rp 1.060.000” sesuai dengan nilai “PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP” yang tercantum dalam *hardcopy*

bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S lalu klik “Add” setelah itu “Save”.

- f. Secara otomatis akan muncul informasi “Data berhasil disimpan! Nomor ID Pajak = 1500001” lalu klik “OK”.



Gambar 3. 6 Tampilan data berhasil disimpan
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 6 tertera nomor ID Pajak yaitu 1500001, kemudian mencatat Nomor ID Pajak tersebut di pojok kanan atas pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 23 PT S.

3.2.2 Menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan BB Desktop.


Bukti potong PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersifat final. Bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) disediakan dalam bentuk *hardcopy*, kemudian diinput ke dalam *software* BB Desktop untuk menyimpan bukti potong. Karena, bukti potong Wajib Bayar diterbitkan oleh pihak luar sehingga tidak ada di laman DJP online perusahaan, karena itu perusahaan perlu menyimpan bukti potong Wajib Bayar dalam *software* BB Desktop. Selain itu, BB Desktop juga menyimpan semua faktur pajak semua unit usaha di Kompas Gramedia. Bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) yang diinput ke *software* BB Desktop dilakukan untuk 7 unit usaha, yaitu PT G, PT KMN, PT SKG, PT ASJ, PT DPKG, PT T, PT KCM dilakukan dalam periode Juni 2024 sampai November 2024 dan bukti potong yang diinput berkisar 100 bukti potong. Dokumen yang diperlukan adalah bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk *hardcopy*.

Berikut langkah-langkah dalam menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT T:

- a. Menerima bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) berupa *hardcopy* dari bagian arsip.

1500004

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
H.1 NOMOR : 2000000118		H.4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final
H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembetulan		H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 02.003.004.5-006.007
 A.2 NIK :
 A.3 Nama : PT T

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dibebaskan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memilih NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
6-2024	28-403-02	37.000.000		10,00	3.700.000

Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensial : Nomor Dokumen 3260 & 3333
 Nama Dokumen Invoice Tanggal 31 dd 05 mm 2024 yyyy


B.8 Dokumen Referensial untuk Faktur Pajak, apabila ada :
 Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
 B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
 B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 20.300.400.5-600.700
 C.2 Nama Wajib Pajak : PT I
 C.3 Tanggal : 25 dd 06 mm 2024 yyyy
 C.4 Nama Penandatanganan : PT I
 C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Pernyataan


X16A25E4

Apabila terdapat kesalahan/pembetulan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atau kelebihan tersebut akan diakukan:
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya ditanggung oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
 Perindebitifan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Gambar 3. 7 Bupot Waba PPh Pasal 4 ayat (2)
 Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan Gambar 3.7 diketahui bahwa bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) memiliki nomor seri pajak 2000000118, NPWP Wajib Pajak 02.003.004.5-006.007, nama Wajib Pajak PT T, masa pajak Juni 2024, DPP Rp 37.000.000, dengan tarif 10%, PPh yang dipotong sebesar Rp 3.700.000, objek pajak persewaan tanah dan/atau bangunan, NPWP pemotong 20.300.400.5-600.700, nama pemotong PT I, tanggal pajak 25

Juni 2024 dan nomor ID Pajak yang tersimpan dalam *BB Desktop* adalah 1500004.

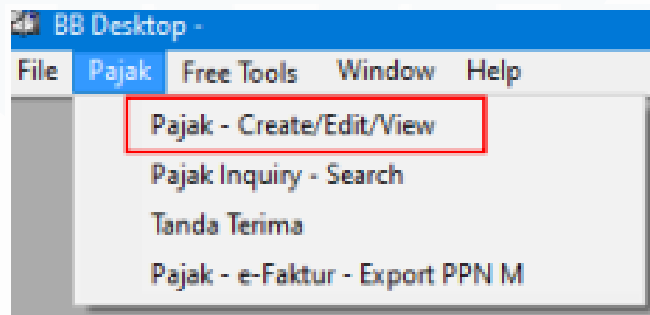
- b. Membuka *software BB Desktop* pada komputer kantor, setelah itu *Log On* dengan mengisi “*User ID*” dan “*Password*” Perusahaan.



Gambar 3. 8 Tampilan *Software BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 8 merupakan tampilan *software BB Desktop* yang akan digunakan untuk melakukan penginputan.

- c. Klik menu “Pajak” lalu klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.



Gambar 3. 9 Menu “Pajak” pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 9 merupakan tampilan awal *BB Desktop* yang terdapat menu *File*, *Pajak*, *Free Tools*, *Window*, *Help*. Untuk penginputan bukti potong wajib bayar dilakukan di menu “Pajak” dan klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

d. Mengisi seluruh informasi pada tampilan tersebut sebagai berikut:

The screenshot shows a software interface for entering tax data. The form is titled 'Pajak' and contains several sections:

- Header:** 'Pajak ID' (empty), 'PPh' (selected).
- 1 Tipe Pajak:** 'PPh 4(2)S :: PPh Pasal 4 (2) Sewa Ge' (selected), 'Pajak Dari Client (WaBa/PPN M)' (checked), 'NPWP Unit' (empty).
- 3 Unit Usaha:** 'PT T' (selected), 'NPWP Unit' (02.003.004.5-006.007).
- 4 Tanggal Pajak:** '25-Jun-2024' (selected), 'Masa Pajak (max 3 bln)' (Jun-2024), 'Input Manual Data Client (Pengusaha Kena Pajak)' (checked).
- 6 No Seri Pajak:** '2000000118'.
- 7 Client (Kena Pajak):** 'PT I' (selected), 'NPWP Client' (20.300.400.5-600.700).
- Client Address 1 & 2:** 'Jakarta'.
- Keterangan:** 'Kode Dokumen' (Faktur Pajak).
- Amount Pajak Total:** (empty), 'Amount DPP Total' (empty), 'Deleted' (checkbox).
- Terbilang:** (empty), 'KTP / Paspor' (empty), 'Client' (empty).
- Input Detail Pajak:**
 - Uraian Pajak:** '1: (PPh 4(2)S)' (selected), 'Sub Uraian' (<None>).
 - 8 Uraian Pajak:** '1: (PPh 4(2)S)' (highlighted).
 - Rincian/Notes:** (empty).
- Table:**

Brutto	Disc Rp (-)	Uang Muka (-)	Netto %	Netto (DPP)	Tarif %	Amount Pajak			
0	0	0	100		0	10	0	Add	Delete Detail
- Table Header:**

Line_No	Uraian_No	Netto_DPP	Tarif_Pct	Amount_Pajak	Uraian_Pajak	Notes	Brutto	Disc_Rp	Uang_Muka_Rp	Net
---------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------	--------	---------	--------------	-----

Gambar 3. 10 Tampilan Setelah Bupot Waba PPh Pasal 4 ayat (2) PT T pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 10, maka pengisian untuk bukti potong wajib bayar PPh 4 Ayat 2 pada *BB Desktop* adalah sebagai berikut:

1. Klik kolom "Tipe Pajak" lalu pilih "PPh Pasal 4 ayat (2)".
2. Centang kolom "Pajak Dari Client (WaBa/PPN M)".
3. Lalu pada kolom "Unit Usaha" sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T, masukkan kode perusahaan "***" lalu "Enter", maka akan secara otomatis terisi "PT T" dan "NPWP Unit" akan terisi "02.003.004.5-006.007".
4. Lalu pada kolom "Tanggal Pajak" masukkan tanggal "25-Jun-2024" sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib

- bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T. Lalu pada kolom “Masa Pajak” masukkan masa “Jun-2023” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T.
5. Lalu centang kolom “Input Manual Data *Client* (Pengusaha Kena Pajak)”.
 6. Lalu pada kolom “No Seri Pajak” masukkan nomor “2000000851” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T.
 7. Lalu pada kolom “*Client* (Kena Pajak)” bagian “NPWP *Client*” masukkan “20.300.400.5-600.700” lalu “*Enter*” maka akan secara otomatis terisi nama perusahaan client “PT I” dan kolom “*Client Address* 1 & 2” akan secara otomatis terisi “Jakarta”.
 8. Lalu pada bagian “Input Detail Pajak” kolom “Uraian Pajak” pilih “1: (PPh 4(2)S)” lalu pada kolom “Sub Uraian” pilih “None” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T.
- e. Setelah itu pada “Input Detail Pajak” mengisi nilai “Brutto” sebagai berikut:

Brutto	Disc Rp (-)	Uang Muka (-)	Netto %	Netto (DPP)	Tarif %	Amount Pajak	
37.000.000	0	0	100	37.000.000	10	3.700.000	Add Delete Detail

Line_No	Uraian_No	Netto_DPP	Tarif_Pct	Amount_Pajak	Uraian_Pajak	Notes	Brutto	Disc_Rp	Uang_Muka_Rp	Net

Buttons: New, Edit, Save, Delete, Close

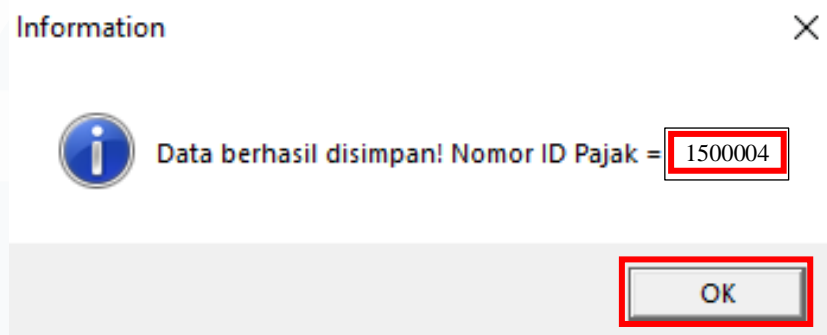
Gambar 3. 11 Tampilan Setelah “Input Detail Pajak”

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 11 pada kolom “Brutto” masukkan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 37.000.000, lalu pada kolom tarif akan terisi secara otomatis sebesar “10%” dan pada kolom “Amount Pajak” juga akan secara otomatis terisi sebesar “Rp 3.700.000” sesuai dengan nilai “PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP” yang tercantum dalam

hardcopy bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T lalu klik “Add” dan “Save”.

- f. Secara otomatis akan muncul informasi “Data berhasil disimpan! Nomor ID Pajak = 1500004” lalu klik “OK”.



Gambar 3. 12 Tampilan Data berhasil disimpan
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 12 tertera nomor ID Pajak yaitu 1500004, kemudian mencatat Nomor ID Pajak tersebut di pojok kanan atas pada hardcopy bukti potong wajib bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT T.

3.3.3 Menginput PPN Masukan dengan *scanner* dan menggunakan *BB Desktop*.

Faktur pajak PPN Masukan ialah Faktur pajak yang diterbitkan pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Faktur pajak PPN Masukan disediakan dalam bentuk *hardcopy*, kemudian diinput ke dalam software BB desktop untuk menyimpan bukti potong. Faktur pajak PPN Masukan diterbitkan oleh pihak luar, sehingga perusahaan menyimpan data faktur pajak PPN Masukan pada *BB Desktop* agar perusahaan dapat mengetahui nilai PPN Masukannya dan besaran nilai PPN yang dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke negara. Faktur pajak PPN Masukan yang diinput ke aplikasi *BB Desktop* dilakukan untuk 33 unit usaha, yaitu PT KMN, PT SKG, PT ASJ, PT DPKG, PT T, PT KCM, PT BMT, PT CMT, PT DI, PT I, PT TDO, PT J, PT BSW, YMN, YBR, PT GAM, PT GMU, PT G, PT MEN, PT GS, PT MMG, PT TTM, PT VCBL, PT DPI, PT BEN, PT MWG, PT KIN, PT BM, PT GM, PT UB, PT JP, PT AIN, PT PCN dilakukan dalam periode Juni 2024 sampai November 2024 dan

bukti potong yang diinput berkisar 500 bukti potong. Dokumen yang diperlukan adalah faktur pajak PPN Masukan dalam bentuk *hardcopy*.

Berikut langkah-langkah dalam menginput faktur pajak PPN Masukan pada PT G:


- a. Menerima faktur pajak PPN Masukan berupa *hardcopy* dari bagian arsip.


Faktur Pajak 1600008

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-24.99728298		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :	PT NCI	
Alamat :	JAKARTA	
JAKART :	30.400.500.6-700.800	
NPWP :	NITKU :	
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :	PT G	
Alamat :	JAKARTA	
Kota/Ka :	03.004.005.6-007.008	
NPWP :	NITKU :	
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		6.000.000
Harga Jual / Penggantian		6.000.000
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		6.000.000
Total PPN		660.000
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 01 Oktober 2024





CRP/24/10/09766 - GRA017

Gambar 3. 13 Faktur Pajak PPN Masukan PT G
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan Gambar 3.13 diketahui bahwa faktur pajak PPN Masukan memiliki nomor seri pajak 010.007-24.99728298, NPWP pembeli BKP/JKP 03.004.005.6-007.008, nama pembeli BKP/JKP PT G, masa pajak Oktober 2024, DPP Rp 6.000.000, dengan tarif 11%, PPh yang dipotong sebesar Rp 660.000. NPWP PKP 30.400.500.6-700.800, nama PKP PT NCI, tanggal pajak 01 Oktober 2024 dan nomor ID Pajak yang tersimpan dalam BB *Desktop* adalah 1600008.

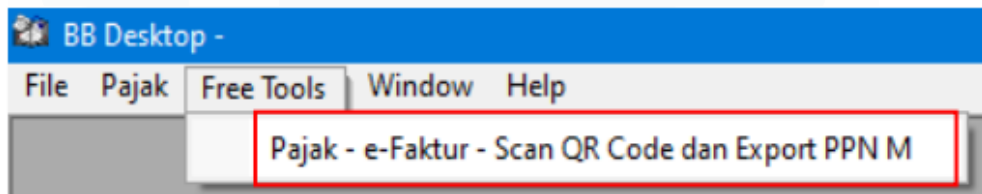
- b. Membuka *software BB Desktop* di komputer kantor, setelah itu *Log On* dengan mengisi “*User ID*” dan “*Password*” Perusahaan.



Gambar 3. 14 Tampilan *Software BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 14 merupakan tampilan *software BB Desktop* yang akan digunakan untuk melakukan penginputan,

- c. Klik “*Free Tools*” lalu klik “*Pajak – e-Faktur – Scan QR Code and Export PPN M*” dan klik “*F4*” untuk “*Siap Scan QR Code*”.



Gambar 3. 15 Menu “*Free Tools*” & “*Pajak – e-Faktur – Scan QR Code dan Export PPN M*”
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 15 merupakan tampilan awal *BB Desktop* yang terdapat menu *File*, *Pajak*, *Free Tools*, *Window*, *Help*. Untuk penginputan faktur pajak dengan *scanner* dilakukan di menu “*Free Tools*” dan klik ““*Pajak – e-Faktur – Scan QR Code and Export PPN M*””. Kemudian klik “*F4*” untuk “*Siap Scan QR Code*”. Arahkan *QR Code* yang ada pada *hardcopy* faktur pajak PPN Masukan PT G ke arah *scanner*.

- d. Lalu seluruh data yang ada pada *hardcopy* PPN Masukan akan muncul secara otomatis.

Id	Deskripsi	Values
statusApproval	Status Approval	Faktur Valid, Sudah Diapprove oleh DJP
statusFaktur	Status Faktur	Faktur Pajak Normal
kdJenisTransaksi	Kode Jenis Transaksi	01
fgPengganti	Flag Pengganti	0
nomorFaktur	Nomor Faktur	0072499728298
tanggalFaktur	Tanggal Faktur	2024/10/01
jumlahDpp	jumlah DPP = Rp.	6.000.000
jumlahPpn	jumlah PPN = Rp.	660.000
jumlahPpnBm	jumlah PPN BM	0
NPWPLawanTransaksi	NPWP Lawan Transaksi	03.004.005.6-007.008
namaLawanTransaksi	Nama Lawan Transaksi	PT G
npwpPenjual	NPWP Penjual	30.400.500.6-700.800
namaPenjual	Nama Penjual	PT NCI
alamatPenjual	Alamat Penjual	
alamatLawanTransaksi	Alamat Lawan Transaksi	

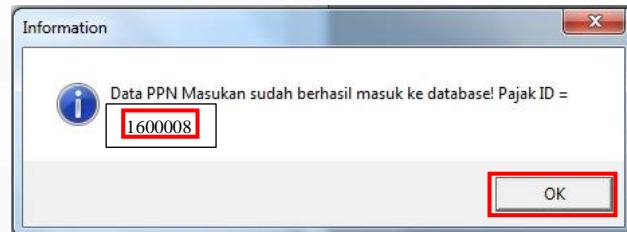
Unit Usaha: PT G | 1 : PPN : 03.004.005.6-007.008
Tentukan Masa Pajak (max 3 bln): Oct-2024
Client: DN | BKP / JKP: BKP
Simpan Data PPN Masukan (F8)

Gambar 3. 16 Tampilan Setelah Input Faktur Pajak PPN Masukan pada BB Desktop
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3.16 tertera jumlah DPP senilai Rp. 6.000.000, jumlah PPN senilai Rp. 660.000, NPWP lawan transaksi yaitu 03.004.005.6-007.008, nama lawan transaksi yaitu PT G, NPWP penjual yaitu 30.400.500.6-700.800 dan nama penjual yaitu PT NCI. Kemudian pada kolom “Masa Pajak” masukkan masa “Oct-2024” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* faktur pajak PPN Masukan PT G. Setelah itu klik “F8” untuk menyimpan data faktur pajak PPN Masukan PT G yang telah dipindai.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

- e. Secara otomatis akan muncul informasi “Data berhasil disimpan! Nomor ID Pajak = 1600008” lalu klik “OK”.



Gambar 3. 17 Tampilan Nomor ID Pajak
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 17 tertera nomor ID Pajak yaitu 1600008, Kemudian mencatat Nomor ID Pajak tersebut di pojok kanan atas pada hardcopy faktur pajak PPN Masukan PT G.

3.3.4 Menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB dengan menggunakan *BB Desktop*.

Bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB disediakan dalam bentuk *hardcopy*, kemudian diinput ke dalam *software BB Desktop* untuk menyimpan bukti potong. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen yang berisi pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas kegiatan impor barang. Tujuan menginput di *BB Desktop* karena, bukti potong Wajib Bayar diterbitkan oleh pihak luar sehingga tidak ada di laman DJP online perusahaan, karena itu perusahaan perlu menyimpan bukti potong Wajib Bayar dalam *software BB Desktop*. Selain itu, *BB Desktop* juga menyimpan semua faktur pajak semua unit usaha di Kompas Gramedia. Bukti potong wajib bayar PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB yang diinput ke *software BB Desktop* dilakukan untuk 2 unit usaha, yaitu PT G dan PT GMU dilakukan dalam periode Juni 2024 sampai November 2024 dan bukti potong yang diinput berkisar 20 bukti potong.

Berikut langkah-langkah dalam menginput bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 22 pada PT G:

- a. Menerima bukti potong Wajib Bayar PPh pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) berupa *hardcopy* dari bagian arsip.

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BC 2.0

Kantor Pabean : KPU BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA 060100 Halaman ke-1 dari 2
 Nomor Pengajuan : 0000200 Tanggal Pengajuan : 01-10-2024

A. JENIS PIB : 1. Biasa; 2. Berkala.
 B. JENIS IMPOR : 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.
 C. CARA PEMBAYARAN : 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya

D. DATA

<p>1. Nama, Alamat : PT FEI PACIFIC TECH Jalan Pacific</p> <p>1a. Nama, Alamat : PT FEI Jalan Pacific</p> <p>2. Identitas : 04.005.006.7-008.009</p> <p>3. Nama, Alamat : PT G</p> <p>4. Status : LAINNYA</p> <p>2a. Identitas : 04.005.006.7-008.009</p> <p>3a. Nama, Alamat : PT G</p> <p>6. NPWP : 40.500.600.7-800.900</p> <p>7. Nama, Alamat : PT FEI</p> <p>8. NP-PPJK :</p>	<p>G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran : 01-10-2024</p> <p>9. Cara Pengangkutan : UDARA 4</p> <p>10. Nama Service Pengangkutan & No. Voy/Flight dan Bandara : MY INDO AIRLINES ZY923 SINGAPORE</p> <p>11. Perkiraan Tanggal Tiba : 29-09-2024</p> <p>12. Pelabuhan Muat : SINGAPORE SGSIN</p> <p>13. Pelabuhan Transit :</p> <p>14. Pelabuhan Tujuan : CENGKARENG / SOEKARNO IDCGK</p> <p>15. Invoice : No. Tgl. 29-09-2024</p> <p>16. Transakal [LAI] : No. Tgl.</p> <p>17. House-BU/AWB : No. Tgl. 27-09-2024</p> <p>Master-BU/AWB : No. Tgl. 29-09-2024</p> <p>18. BC 1.1/1.2 : No. Tgl. 29-09-2024 Pos Sub Pos. 02220000</p> <p>19. Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Impor : NO. NULL TOL NULL NULL</p> <p>20. Tempat Penimbunan : TB11 TPS-TNS SKYPAK INT. (TNT)</p> <p>21. Valuta : SGD 22. NOPBM : 11800.2</p> <p>23. Cost : 13.854</p> <p>24. Insurance : 71</p> <p>25. Freight : 75</p> <p>26. Nilai Pabean : 14.000 Rp. 165.202.800</p> <p>27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Kemasan : 28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan : 1 PACKAGE, SEBUAI AWB 29. Berat Kotor (Kg) : 12.5000 30. Berat Bersih : 12.5000</p>
--	---

31. No.	32. - Pos Tarif HS - Urutan Jenis Barang, Merek, Tipe, Spesifikasi Wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Unit - Persyaratan & No. Unit	34. Tarif dan Fasilitas	35. - Jumlah dan Jenis Setuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah dan Jenis	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang Ditambahkan
---------	---	--	-------------------------	--	---

9 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan

Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Ditunai
37. BM	8.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. BM KITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. BMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. PPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. PPhBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. PPh	4.330.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Dengan ini saya menyatakan :

a. Berlanggung jawab atas kebenaran hal - hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini ; dan

b. Sanggup menyetorkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyetorkan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

Importir/PPJK

PPJK

E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN :

a. Pembayaran 1. Bank 2. Post 3. Kantor Pabean
 b. Jaminan 1. Tunai 2. Bank Garansi
 3. Customs Bond 4. Lainnya

	Nomor	Tanggal
a.		
b.		

Rangkap ke-1/2/3/4 untuk Importir/Kantor Pabean/BPS/BI

Gambar 3. 18 Bupot Waba PPh Pasal 22 atas impor
 Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan Gambar 3.18 diketahui bahwa bukti potong Wajib Bayar PPh Pasal 22 (Impor) senilai Rp. 4.330.070, angka tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

CIF (*Cost, Insurance, Freight*) x NDPBM (Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk) = Nilai Pabean dalam rupiah + BM (Bea Masuk) = DPP x PPh 22 (2,5%)

CIF = 14.000
 NDPBM = 11.800,2
 Nilai Pabean = 165.202.800
 BM = 8.000.000
 DPP = 173.202.800
 PPh 22 (2,5%) = 4.330.070

NPWP Wajib Pajak 04.005.006.7-008.009, nama Wajib Pajak PT G dan NPWP pemotong 40.500.600.7-800.900, nama pemotong PT FEI. Kemudian berikut tampilan lembar lanjutan dari dokumen PIB:

LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)					
Kantor Pabean : KPU BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA		050100		Halaman ke-2 dari 2	
Nomor Pengajuan :		Tanggal Pengajuan : 01-10-2024			
Nomor Pendaftaran :		Tanggal Pendaftaran : 01-10-2024			
31 No	32 - Pos Tarif HS - Urutan Jenis Barang, Merek, Tipe, Spekt - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Unit - Penyeratan & No. Unit	34. Tarif dan Fasilitas	35. - Jumlah dan Jenis Satuan Barang - Jumlah dan Jenis Kemasan	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yg Ditambahkan - Jatur Tempo
1	Pos Tarif: 82057000 Kode Bp: Urutan: Merek: Kandisi: Negara:		BM 5% PPH 2.5% PPN 11%	100% BYR 100% BYR 100% BYR	1.0000 PIECE (PIE) 12.8000 0.00 PACKAGE (PK)
2	Pos Tarif: 82057000 Kode Bp: Urutan: Merek: Kandisi: Negara:		BM 5% PPH 2.5% PPN 11%	100% BYR 100% BYR 100% BYR	1.0000 PIECE (PIE) 0.0000 0.00 PACKAGE (PK)

Gambar 3. 19 Lembar Lanjutan Dokumen PIB
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3.19 merupakan detail transaksi dan jenis barang impor. Tertera tarif yang dikenakan yaitu Bea Masuk yaitu sebesar 5%, PPh 22 sebesar 2,5% dan PPN sebesar 11%.

Berikut tampilan BPE (Bukti Penerimaan Negara):

Data Pembayaran	
Tanggal Buku	: 02/10/2024
Kode Cabang Bank	: 008
NTB/NTP	: [REDACTED]
NTPN	: 8C6CC7LI83FQFG2Q
STAN	: [REDACTED]

Data Setoran	
Kode Billing	: [REDACTED]
Id Wajib Bayar	: 04.005.006.7-008.009
Nama Wajib Bayar	: PT G
Jenis Dokumen	: 01
Nomer Dokumen	: 00002002914220240929043368
Tanggal Dokumen	: 2024-10-01
kode KPPBC	: 050100

Gambar 3. 20 Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 22 atas Impor
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3.20 tertera tanggal buku 02 Oktober 2024, NTPN 8C6CCC7LI83FQFG2Q dan nomor ID Pajak yang tersimpan dalam *BB Desktop* adalah 1600005.

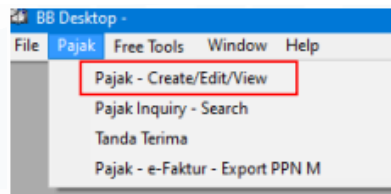
- b. Membuka software *BB Desktop* dikomputer kantor, setelah itu *Log On* dengan mengisi “*User ID*” dan “*Password*” Perusahaan



Gambar 3. 21 Tampilan *Software BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 21 merupakan tampilan *software BB Desktop* yang akan digunakan untuk melakukan penginputan.

- c. Klik menu “Pajak” lalu klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.



Gambar 3. 22 Menu “Pajak” pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 22 merupakan tampilan awal *BB Desktop* yang terdapat menu *File*, *Pajak*, *Free Tools*, *Window*, *Help*. Untuk penginputan faktur pajak dengan *scanner* dilakukan di menu “Pajak” dan klik “Pajak – *Create/Edit/View*”.

- d. Mengisi seluruh informasi pada tampilan tersebut sebagai berikut:

Line_No	Uraian Pajak	Sub Uraian	Rincian/Notes:	Tarif %	Amount Pajak
01	Jenis Industri : (PPh 22)				
02	Semen (PPh 22)				
04	Baja (PPh 22)				
05	Otomotif (PPh 22)				
06	Uraian (PPh 22)				
07	Uraian (PPh 22)				
09	Uraian (PPh 22)				

Gambar 3. 23 Tampilan Setelah Input Faktur Pajak PPN Masukan PT G pada *BB Desktop*
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 23 maka pengisian untuk bukti potong wajib bayar PPh 22 pada *BB Desktop* adalah sebagai berikut:

1. Klik kolom “Tipe Pajak” lalu pilih “PPh 22”.

2. Centang kolom “Pajak Dari Client (WaBa/PPN M)”.
 3. Lalu pada kolom “Unit Usaha” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G, masukkan kode perusahaan “****” lalu “Enter”, maka akan secara otomatis terisi “PT G” dan “NPWP Unit” akan terisi “04.005.006.7-008.009”.
 4. Lalu pada kolom “Tanggal Pajak” masukkan tanggal “02-Oct-2023” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G. Lalu pada kolom “Masa Pajak” masukkan masa “Oct-2023” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G.
 5. Lalu centang kolom “Input Manual Data Client (Pengusaha Kena Pajak)”.
 6. Lalu pada kolom “No Seri Pajak” masukkan nomor “8C6CCC7LI83FQFG2Q” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G.
 7. Lalu pada kolom “Client (Kena Pajak)” bagian “NPWP Client” masukkan “40.500.600.7-800.900” lalu “Enter” maka akan secara otomatis terisi nama perusahaan client “PT FEI” dan kolom “Client Address 1 & 2” akan secara otomatis terisi “JAKARTA”.
 8. Kemudian pada bagian “Kode Dokumen” diubah menjadi “Dokumen yang di persamakan FP”.
 9. Lalu pada bagian “Input Detail Pajak” kolom “Uraian Pajak” pilih “06: Uraian (PPh 22)” lalu pada kolom “Sub Uraian” pilih “None” sesuai dengan yang tercantum pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G.
- e. Setelah itu pada “Input Detail Pajak” mengisi nilai “Brutto” sebagai berikut:

Gambar 3. 24 Tampilan “Input Detail Pajak”

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 24 pada kolom “Brutto” masukkan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 173.202.800, karena pada PPh 22 ini tarifnya tidak selalu sama maka pada kolom “Amount Pajak” diisi manual yaitu sebesar “Rp 4.330.070” sesuai dengan yang tercantum dalam *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G lalu klik “Add” setelah itu klik “Save”.

- f. Secara otomatis akan muncul informasi “Data berhasil disimpan! Nomor ID Pajak = 1600005” lalu klik “OK”.

Gambar 3. 25 Tampilan “Nomor ID Pajak” pada *BB Desktop*

Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3.25 tertera nomor ID Pajak yaitu 1600005. Kemudian mencatat Nomor ID Pajak tersebut di pojok kanan atas pada *hardcopy* PPh Pasal 22 atas impor berdasarkan dokumen PIB PT G.

3.3.5 Menginput dan melaporkan SPT Tahunan Badan Normal 1771 dan SPT Tahunan Badan Pembetulan 1 1771.

Sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia, Kompas Gramedia beserta unit usahanya harus melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Badan dilaporkan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, menghitung pajak terutang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Laporan ini juga diperlukan untuk menghindari sanksi administratif dan digunakan sebagai referensi untuk evaluasi keuangan atau pengajuan kredit. Pada beberapa unit usaha Kompas terkadang terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan, seperti kesalahan perhitungan pajak, data yang salah, atau pendapatan/beban yang terlewat. Sehingga, dilakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan untuk memastikan kewajiban pajak dilaporkan dengan benar dan menghindari sanksi. Unit usaha yang dilaporkan SPT Tahunan Badan normal adalah PT M dikerjakan dalam periode bulan Juni 2024, sedangkan unit usaha yang dilaporkan SPT Tahunan Badan Pembetulan 1 yaitu PT BMM dan PT DI dikerjakan dalam periode bulan Juni 2024, kemudian PT RS dikerjakan dalam periode bulan Agustus 2024. Dokumen yang dibutuhkan yaitu *softcopy file* laporan keuangan, daftar aset, daftar nominatif dan SPT Badan tahun 2022.

Berikut langkah-langkah dalam menginput dan melaporkan SPT Tahunan Badan normal PT M tahun 2023:

- a. Menerima *softcopy* berupa “Laporan Keuangan”, “Daftar aset” dan “Daftar nominatif” PT M tahun 2023, serta *file* PT M 2022 dari senior staff melalui *email*.

2022 PB 1	11/13/2024 1:47 PM	WinRAR archive	4,724 KB
Aset MMN 2023	6/14/2024 10:30 AM	Microsoft Office E...	42 KB
Daftar Nominatif	6/6/2024 1:50 PM	Microsoft Office E...	13 KB
lapkeu MMN 2023	6/25/2024 2:44 PM	Adobe Acrobat D...	1,145 KB

Gambar 3. 26 *Softcopy* PT M Tahun 2022 dan Tahun 2023
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 26 tertera *softcopy file* laporan keuangan tahun 2023 PT M, daftar aset PT M tahun 2023, daftar nominatif PT M tahun 2023 dan *file* SPT Badan PT M tahun 2022.

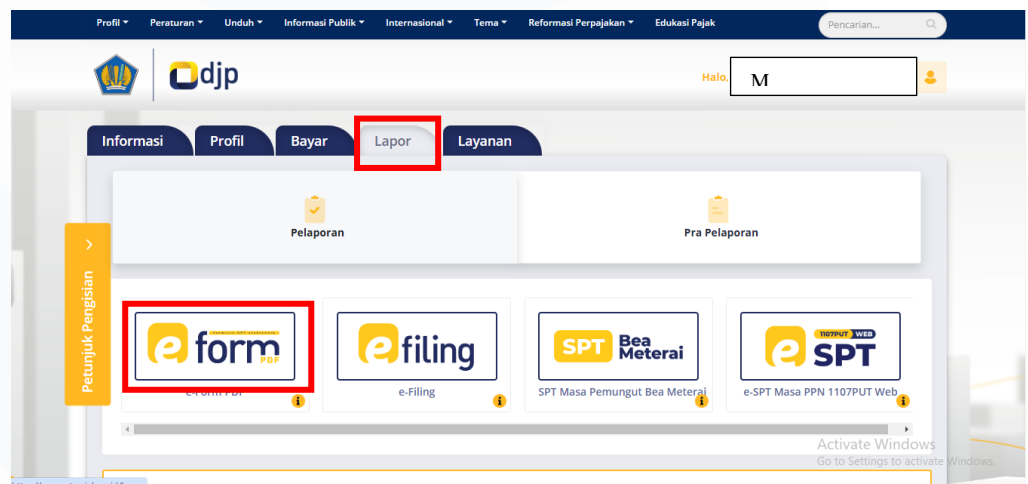
- b. Buka website DJP online “www.djponline.pajak.go.id”.



Gambar 3. 27 Tampilan *Login* pada *Website DJP Online*
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada gambar 3. 27 login dengan mengisi kolom “NIK/NPWP” dengan NPWP PT M “05.006.007.8-009.010” dan mengisi Kata Sandi perusahaan, kemudai mengisi kolom “Kode Keamanan” dan klik “*Login*”.

- c. Kemudian klik menu “Lapor” dan mengunduh formulir dengan klik “*e-form PDF*”.



Gambar 3. 28 Tampilan menu “Lapor” pada *Website DJP Online*
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada Gambar 3. 28 merupakan halaman kedua dari situs *DJP Online*, terdapat beberapa menu Tab seperti Informasi, Profil, Bayar, Lapor, dan Layanan. Pengunduh e-form dilakukan pada menu Lapor bagian Pra Pelaporan.

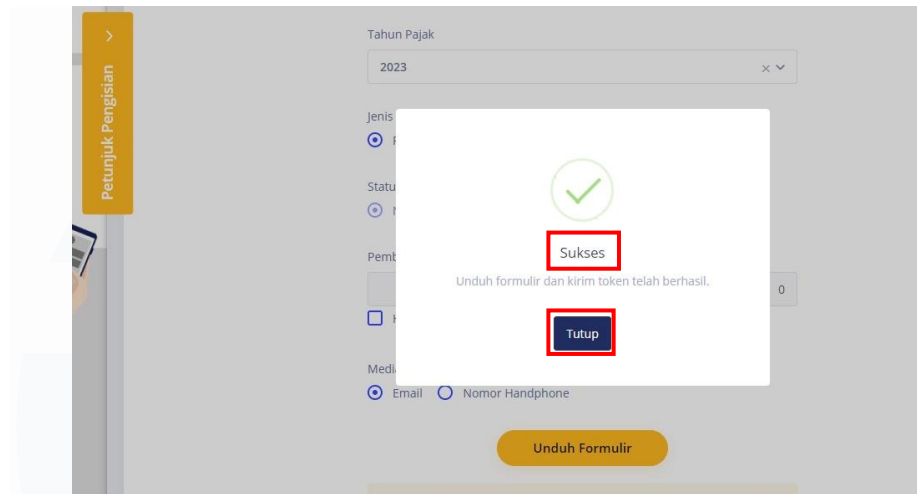
d. Kemudian pada menu “Buat SPT” akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3. 29 Tampilan Menu “Buat SPT” pada *Website DJP Online*
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada gambar 3. 29 untuk kolom “Tahun Pajak” pilih “2023”, “Jenis Pajak” klik “Rupiah”, “Status SPT” akan otomatis terpilih “Normal” dan pada kolom “Media Pengiriman Token” klik “*Email*”. Kemudian klik “Unduh Formulir”.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

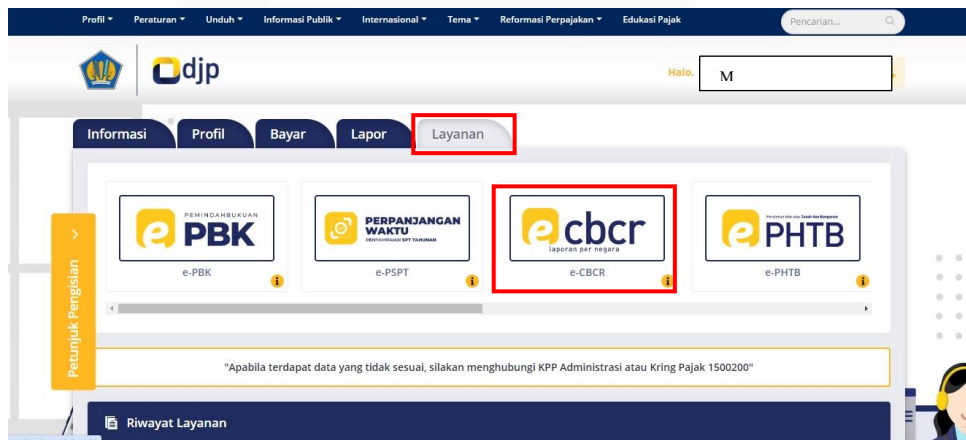
- e. Lalu muncul “Sukses” lalu klik “Tutup”.



Gambar 3. 30 Tampilan “Sukses” pada Website DJP Online
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada gambar 3.30 merupakan tampilan jika pengunduhan *e-form* telah berhasil. Kemudian *e-form* akan otomatis ter-*download* dalam file.

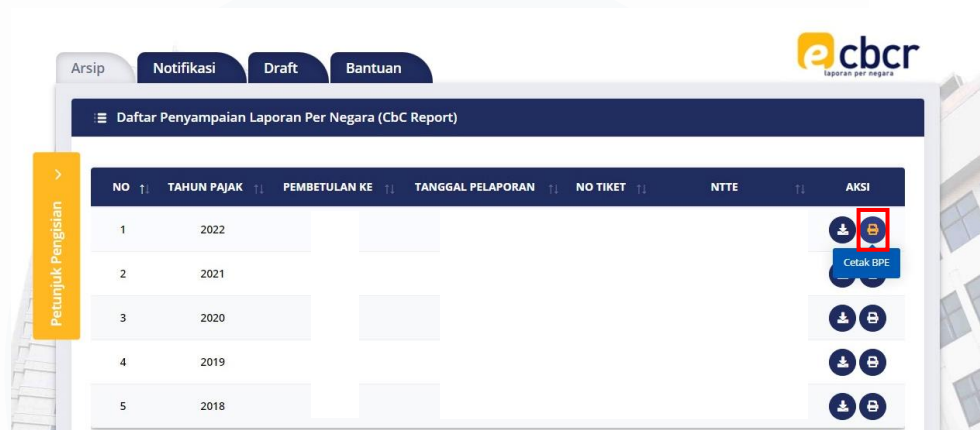
- f. Lalu unduh *CBCR* (*Country-by-Country Reporting*) dimenu “Layanan” klik “*e-cbcr*”.



Gambar 3. 31 Tampilan Menu “Layanan” pada Website DJP Online
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada gambar 3. 31 pengunduhan *e-cbcr* dilakukan pada menu layanan kemudian bagian *e-cbcr*.

- g. Lalu muncul tampilan menu *e-cbr* klik “Cetak BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)” untuk tahun 2022.



Gambar 3. 32 Tampilan “*e-cbr*” pada Website DJP Online
Sumber: djponline.pajak.go.id

Pada gambar 3. 32 bagian arsip terdapat BPE yang telah disampaikan, kemudian cetak BPE tahun 2022 untuk dilampirkan pada dokumen lampiran lainnya. Kemudian *E-cbr* akan otomatis terunduh.

- h. Lalu buka *e-Form* yang telah diunduh, setelah itu bukan form “Induk” dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar 3. 33 Formulir 1771 Induk
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 33 untuk indentitas bagian “Identitas” akan otomatis terisi, sesuaikan data yang ada pada kolom dibawah identitas dengan laporan keuangan yang telah diberikan. Untuk “Pembukuan/Laporan Keuangan” klik “diaudit” lalu “Opini Akuntan” pilih “wajar tanpa pengecualian” yang telah disesuaikan dengan laporan auditor independen. Kemudian “Nama Kantor Akuntan Publik”, “NPWP Kantor Akuntan Publik”, “Nama Akuntan Publik” dan “NPWP Akuntan Publik” diisi sesuai yang tertera di laporan keuangan.

Registered Public Accountants
License No. Kep-657/KM.17/1998

KAP L

00044/2.0094/AU.1/10/0377-5/1/VI/2024

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT M

Opini

PT M

Kami telah mengaudit laporan keuangan (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan defisiensi modal, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Gambar 3. 34 Laporan Keuangan Audited PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 34 tertera bahwa laporan auditor independen yang dilakukan pada KAP L untuk PT M, laporan keuangan PT M tahun 2023 terlampir menyajikan secara wajar. Karena itu, pada formulir 1771 Induk untuk opini audit diisi “Wajar tanpa pengecualian”.

i. Lalu buka lampiran khusus 3A 1, isi lampiran sesuai dengan tahun lalu

Gambar 3. 35 Lampiran Khusus 3A 1 PT M 2022
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 35 merupakan lampiran khusus 3A 1 tahun 2022 yang terdapat pilihan “Ya” atau “Tidak”, untuk bagian 1 “Mengenal Gambaran Perusahaan Secara Rinci” di klik “Ya”, bagian 2 “Mengenal Transaksi” di klik “Ya”, bagian 3 “Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan” di klik “Tidak”, bagian 4 “Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan” di klik “Tidak”. Kemudian untuk lampiran khusus 3A 1 tahun 2023 diisi sesuai dengan lampiran khusus 3A 1 tahun 2022.



Berikut tampilan lampiran khusus 3A 1 PT M tahun 2023:

LAMPKHUS 3A 1		BUKA
LAMPIRAN KHUSUS		
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN		
TAHUN PAJAK 2023		
PENYERTAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA		
NPWP	05.006.007.8-009.010	
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	PT M	
<p>DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJIB TRANSAKSI Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan keadilan.</p> <p>1. Mengenal Gambaran Perusahaan Secara Rinci Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang:</p> <p>Ya Tidak <input type="button" value="Reset Pilihan"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.</p> <p><input type="radio"/> Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci</p> <p>2. Mengenal Transaksi Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang:</p> <p>Ya Tidak <input type="button" value="Reset Pilihan"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.</p> <p><input type="radio"/> Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut: - Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir - Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyediaan jasa.</p> <p>3. Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang:</p> <p>Ya Tidak <input type="button" value="Reset Pilihan"/></p> <p><input type="radio"/> Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.</p> <p><input type="radio"/> Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.</p> <p>4. Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang:</p> <p>Ya Tidak <input type="button" value="Reset Pilihan"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.</p>		

Gambar 3. 36 Lampiran Khusus 3A 1 PT M 2023

Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 36 merupakan lampiran khusus 3A 1 tahun 2023 yang diisi sesuai dengan lampiran khusus 3A 1 tahun 2022, terdapat pilihan “Ya” atau “Tidak”, untuk bagian 1 “Mengenal Gambaran Perusahaan Secara Rinci” di klik “Ya”, bagian 2 “Mengenal Transaksi” di klik “Ya”, bagian 3 “Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan” di klik “Tidak”, bagian 4 “Mengenal Catatan Hasil Analisis Kesebandingan” di klik “Tidak”.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

- j. Lalu buka lampiran khusus 3A, isi sesuai dengan laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023 yang terdapat di catatan atas laporan keuangan No. 22 “Informasi Mengenai Pihak-Pihak Berelasi”. Untuk Alamat, NPWP, dan Kegiatan Usaha diisi sesuai dengan yang diberikan oleh senior staff. Berikut tampilan catatan atas laporan keuangan no. 22:

22. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi	
PT IP	
PT KMN	
PT G PT J PT BMG	

Gambar 3. 37 Catatan atas laporan keuangan No.22 untuk “Bagian I”
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 37 tertera pihak-pihak berelasi yaitu PT IP, PT KMN, PT G, PT J dan PT BMG. Kemudian, berikut tampilan rincian nilai transaksi dari pihak-pihak berelasi:

Pendapatan	
Pendapatan agen	
PT KMN	8.000.000.000
Pendapatan iklan	
PT IP	6.000.000.000
PT G	3.000.000.000
PT TAJ	44.000.000
PT BMG	39.000.000
Persentase terhadap jumlah pendapatan	

Gambar 3. 38 Catatan atas laporan keuangan No.22 untuk “Bagian II”
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 38 tertera nilai transaksi dari pihak-pihak berelasi, PT KMN dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 8.000.000.000, PT IP dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 6.000.000.000, PT G dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 3.000.000.000, PT TAJ dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 44.000.000 dan PT BMG dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 39.000.000.

Kemudian mengisi lampiran khusus 3A sesuai dengan informasi dari Catatan atas laporan keuangan dan senior staff sebagai berikut:

LAMPKHS 3A BUKA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK **2023**

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 05.006.007.8-009.010
 NAMA : PT M

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER	KEGIATAN USAHA	BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP
1.	PT IP	Jl. Mangga	102003004500600		Hubungan istimewa karena kepemilikan
2.	PT KMN	Jl. Jerik	203004005600700		Hubungan istimewa karena penguasaan
3.	PT G	Jl. Apel	304005006700800		Hubungan istimewa karena penguasaan
4.	PT IAJ	Jl. Duren	405006007800900		Hubungan istimewa karena penguasaan
5.	PT BMG	Jl. Pisang	506007008900110		Hubungan istimewa karena penguasaan

Tambah Hapus Data ke- 14 Next Rows 1 to 5 of 14

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	METODE PENETAPAN HARGA	ALASAN PENGGUNAAN METODE
1.	PT IP	Dan lain-lain	6.000.000.000	Transactional Net Margin Method	MENDAPATKAN HARGA WAJIB
2.	PT KMN	Dan lain-lain	8.000.000.000	Transactional Net Margin Method	MENDAPATKAN HARGA WAJIB
3.	PT G	Dan lain-lain	3.000.000.000	Transactional Net Margin Method	MENDAPATKAN HARGA WAJIB
4.	PT IAJ	Dan lain-lain	44.000.000	Transactional Net Margin Method	MENDAPATKAN HARGA WAJIB
5.	PT BMG	Dan lain-lain	39.000.000	Transactional Net Margin Method	MENDAPATKAN HARGA WAJIB

Tambah Hapus Data ke- 13 Next Rows 1 to 5 of 13

Gambar 3. 39 Lampiran Khusus 3A
 Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 39 merupakan tampilan khusus 3A yang sudah dilakukan penginputan untuk daftar pihak yang memiliki hubungan Istimewa dan rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Istimewa.

- k. Lalu buka lampiran khusus 2A, untuk tahun 2018-2022 isi sesuai dengan nominal yang tertera pada *e-Form* tahun 2022. Tahun 2023 diisi sesuai dengan yang tertera pada laporan keuangan *audited* PT M 2023. Berikut tampilan laporan keuangan *audited* PT M 2023:

	2023
Rugi sebelum pajak	(553.000.000)
Koreksi beda tetap :	
Beban perjamuan	22.000.000
Denda pajak	454.000
Jasa giro	(10.300.000)
Bunga deposito	(25.000.000)
Sebagian dari beban lain-lain	192.846.000
	180.000.000
Koreksi beda temporer :	
Beban imbalan kerja	(1.027.000.000)
Rugi fiskal	(1.400.000.000)

Gambar 3. 40 Rugi Fiskal pada LK *Audited* PT M 2023
 Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 40 tertera bahwa rugi fiskal 2023 sebesar Rp. 1.400.000.000, maka pada lampiran 2A untuk tahun 2023 diisi Rp. 1.400.000.000 dan untuk tahun 2018 sampai 2022 diisi sesuai SPT Badan tahun lalu, sebagai berikut:

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL							
NO	TAHUN	RUPIAH	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022	TH. 2023	TH. 2024	
			(RUPIAH)	(RUPIAH)	(RUPIAH)	(RUPIAH)	(TAHUN PAJAK (N) RUPIAH*)	(TAHUN BERJALAN) RUPIAH**)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	2013	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2014	0	0	0	0	0	0	0	
3.	2015	0	0	0	0	0	0	0	
4.	2016	0	0	0	0	0	0	0	
5.	2017	0	0	0	0	0	0	0	
6.	2018		0		0	0	0	0	
7.	2019		0		0	0	0		
8.	2020		0	0	0	0	0		
9.	2021		0	0	0	0	0		
10.	2022		0	0	0	0	0		
11.	2023	-1.400.000.000	0	0	0	0	0	1.400.000.000	
JUMLAH		JML	0	0	0	0	0	0	

Gambar 3. 41 Lampiran Khusus 2A
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 41 merupakan tampilan lampiran khusus 2A yang sudah dilakukan penginputan kerugian dan penghasilan neto fiskal berdasarkan laporan keuangan.

1. Pada lampiran khusus 1A, impor data menggunakan *softcopy* .csv yang telah diberikan oleh senior staff. Lalu sesuaikan jumlah penyusutan fiskal dan komersial dengan laporan keuangan *audited* PT M 2023.



Aset MMN 2023

Gambar 3. 42 *Softcopy* untuk Impor Data di Lampiran Khusus 1A
Sumber: Data Perusahaan

Kemudian pada 3. 43 klik “Impor Data” dan daftar aset akan muncul secara otomatis.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2023
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P: 05.006.007.8-009.010 NAMA WAJIB PAJAK: PT M

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
606	Harta Berwujud	Kelompok 1	INVENTARIS	S	2017	1.050.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	HARD DISK INT
607	Harta Berwujud	Kelompok 1	INVENTARIS	S	2017	350.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	HARD DISK INT
608	Harta Berwujud	Kelompok 1	INVENTARIS	S	2017	350.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	HARD DISK INT
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										152.356.437	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										152.356.437	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGIKA 5 HURUF I ATAU ANGIKA 6 HURUF a										0	

Gambar 3. 43 Lampiran Khusus 1A
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 43 tertera jumlah penyusutan fiskal dan komersial sejumlah Rp.152.356.437. Kemudian menyamakan nilai jumlah penyusutan fiskal dan komersial dengan nilai penyusutan yang tercatat pada laporan keuangan sudah sesuai sejumlah Rp. 152.356.437 atau tidak. Berikut tampilan akumulasi penyusutan pada PT M:

9. ASET TETAP

	2022	Penambahan	Reklasifikasi	2023
Harga perolehan				
Tanah		-	-	
Inventaris		-	-	
Kendaraan		-	-	
Akumulasi penyusutan				
Inventaris		100.356.437	-	
Kendaraan		52.000.000	-	
Nilai buku bersih		152.356.437	-	

Gambar 3. 44 Akumulasi Penyusutan pada LK Audited PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 44 tertera akumulasi penyusutan aset sebesar Rp. 152.356.437 dan nilai tersebut sesuai dengan jumlah penyusutan fiskal dan komersial pada lampiran khusus 1A, maka daftar aset pada lampiran khusus 1A sudah sesuai.

m. Lalu lampiran V, pada “Bagian A” isi sesuai dengan laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023. Berikut tampilan catatan atas laporan keuangan no. 14:

14. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, modal ditempatkan dan disetor penuh, diambil oleh :

Pemegang saham	Saham	Jumlah	Persentase (%)
PT IP			99,97
PT TT			0,03
Jumlah			100,00

Gambar 3. 45 Catatan atas laporan keuangan no. 14
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 45 tertera bahwa pemegang saham PT M yaitu PT IP dan PT TT dengan persentase saham masing-masing sebesar 99,97% dan 0,03%.

	2023
Komisaris	: TN. A
Direktur Utama	: TN. D
Direktur	: TN. H

Gambar 3. 46 Catatan atas laporan keuangan no. 14
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 46 tertera informasi Komisaris yaitu Tn. A, direktur utama Tn. D dan direktur Tn. H. Kemudian mengisi lampiran V sesuai dengan informasi di catatan atas laporan keuangan no. 14, untuk alamat dan NPWP diberikan oleh senior staff sebagai berikut:

FORMULIR 1771 - V **LAMPIRAN - V**
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK **2023**

IDENTITAS
 N P W P : 05.006.007.8-009.100
 NAMA WAJIB PAJAK : PT M
 PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)	%	DIVIDEN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT IP	Jl. Palmerah	21.221.231.4.251.261		99,97	0
2	PT TT	Jl. Tanah Abang	11.112.113.4.115/116		0,03	0
JUMLAH BAGIAN A				JBA	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TN. D	Jl. Cimahi	31.411.511.6.711.811	DIREKTUR UTAMA
2.	TN. A	Jl. Cikokol	21.221.231.4.251.261	KOMISARIS
3.	TN. H	Jl. Ciledug	11.112.113.4.115/116	DIREKTUR

Gambar 3. 47 Lampiran V
 Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 47 merupakan tampilan lampiran V setelah dilakukan pengisian untuk daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris berdasarkan catatan atas laporan keuangan no. 14.

- n. Pada lampiran IV, “Bagian A” No. 1 “Bunga Deposito / Tabungan dan Diskonto SBI / SBN” diisi sesuai dengan laporan keuangan audited PT M tahun 2023 yang terdapat di catatan atas laporan keuangan no. 19 “Pendapatan Keuangan”. Berikut tampilan catatan atas laporan keuangan no. 19:

. PENDAPATAN KEUANGAN

	2023
Bunga deposito	28.000.000
Jasa giro	7.000.000
Jumlah	35.000.000

Gambar 3. 48 Catatan atas laporan keuangan no. 19
 Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 48 Jumlah pendapatan keuangan sebesar Rp. 28.000.000 yang merupakan penjumlahan dari bunga deposito dengan jasa giro. Nominal pada laporan keuangan merupakan nominal yang sudah dikurangi pajak yaitu sebesar 20%, maka perlu dicari dasar pengenaan pajaknya yaitu dari bunga deposito ditambah jasa giro sebesar Rp. 35.000.000 lalu dikali 100 dibagi 80. Kemudian didapatkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 43.750.000. Kemudian pindahkan angka tersebut ke Lampiran IV sebagai berikut:

LAMPIRAN IV BUKA

FORMULIR 1771 - IV
LAMPIRAN - IV
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
 TAHUN PAJAK **2023**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

N P W P : 05.006.007.8-009.010
 NAMA WAJIB PAJAK : PT M
 PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	43.750.000	20	8.750.000
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				8.750.000

Gambar 3. 49 Lampiran IV
 Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 49 diisi dasar pengenaann pajak sesuai dengan sebesar Rp. 43.750.000, lalu pada kolom “Tarif” diisi 20 maka kolom “PPH Terutang” akan otomatis terisi Rp. 8.750.000.

- o. Pada lampiran II, mengisi sesuai dengan laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023 yang terdapat di Catatan Atas Laporan Keuangan No. 16 “Beban Pokok Pendapatan” ke kolom “Harga Pokok Penjualan”, No. 17 “Beban Penjualan” dan No. 18 “Beban Umum dan Administrasi” ke kolom “Biaya Usaha Lainnya” dan No.20 “Beban Lain-Lain” ke kolom “Biaya Dari Luar Usaha”. Apabila terdapat biaya yang tidak memiliki “rincian” pada lampiran II, maka biaya tersebut diisi ke kolom no. 11 “biaya lainnya” dan harus dibuatkan daftar biaya lainnya.

16. BEBAN POKOK PENDAPATAN		2023
	Beban dan jasa cetak (Catatan 22)	
A	Gaji dan tunjangan karyawan	5.000.000.000
	Beban pokok event	
	Beban pokok iklan	
	Beban imbalan kerja	
	Beban jaringan (Catatan 22)	
B	Penyusutan aset tetap	111.000.000
	Keperluan kantor (utilities)	
	Beban berita	
C	Amortisasi software	1.000.000
	Lain-lain	
	Jumlah	<u> </u>

Gambar 3. 50 Catatan atas laporan keuangan No.16
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 50 untuk catatan atas laporan keuangan no. 16 diisi di kolom “Harga Pokok Penjualan” pada Lampiran II. Untuk rincian no. 4 nominalnya diperoleh dari penambahan B dengan C. Kemudian berikut tampilan rincian beban penjualan dan beban umum dan administrasi:

17. BEBAN PENJUALAN		2023
	Beban kirim	
D	Gaji dan tunjangan karyawan	1.300.000.000
	Beban komisi	
	Beban distribusi penjualan (Catatan 22)	
	Pekerja bebas	
	Beban imbalan kerja	
E	Pemakaian gedung	40.000.000
F	Beban promosi	19.000.000
G	Penyusutan aset tetap	18.000.000
	Lain-lain	
	Jumlah	<u> </u>

Gambar 3. 51 Catatan atas laporan keuangan No.17
Sumber: Data Perusahaan

18. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

		2023
H	Gaji dan tunjangan karyawan	700.000.000
I	Pemakaian gedung (Catatan 22)	299.000.000
	Keperluan kantor (<i>utilities</i>)	
	Pekerja bebas	
	Beban imbalan kerja	
	Beban material pemeliharaan aset tetap	
J	Penyusutan aset tetap	23.000.000
	Pajak bumi bangunan	
	Lain-lain	
	Jumlah	

Gambar 3. 52 Catatan atas laporan keuangan No.18
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 51 dan gambar 3. 52 untuk Catatan atas laporan keuangan no. 17 dan no. 18 diisi di kolom “Biaya Usaha Lainnya”. Untuk rincian no. 2 nominalnya diperoleh dari penambahan D dengan H, rincian no. 4 nominalnya diperoleh dari penambahan G dengan J, rincian no. 5 nominalnya diperoleh dari penambahan E dengan I, rincian no. 10 nominalnya diperoleh dari huruf F. Berikut tampilan rincian beban lain-lain:

20. BEBAN LAEN-LAIN

		2023
	Beban fungsional daerah (Catatan 22)	
	Beban bank	
	Denda pajak	
	Lain-lain	
K	Jumlah	1.800.000.000

Gambar 3. 53 Catatan atas laporan keuangan No. 20
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 53 untuk Catatan atas laporan keuangan no. 20 diisi di kolom “Biaya dari luar usaha”. Kemudian untuk biaya yang tidak memiliki rincian pada lampiran II, maka biaya tersebut diisi ke kolom no. 11 “biaya lainnya” dan harus dibuatkan daftar biaya lainnya. Berikut tampilan daftar biaya lainnya dari catatan atas laporan keuangan No. 16, No. 17, No. 18, No. 20 yang diisi pada kolom no. 11 pada lampiran II:

LAMPIRAN 1771-II
TAHUN PAJAK 2023

NAMA WAJIB PAJAK NPWP	PT M 05.006.007.8-009.010	
NO. 11 : BIAYA LAINNYA		
HARGA POKOK PENJUALAN		
Beban dan jasa cetak		
Beban pokok event		
Beban pokok iklan		
Beban imbalan kerja		
Beban jaringan		
Keperluan kantor (utilities)		
Beban berita		
Lain-lain		
L JUMLAH		11.000.000.000
BIAYA USAHA LAINNYA		
Beban kirim		
Beban komisi		
Beban distribusi penjualan		
Beban imbalan kerja		
Keperluan kantor (utilities)		
Beban material pemeliharaan aset tetap		
Pajak bumi bangunan		
Lain-lain		
M JUMLAH		3.000.000.000
BIAYA DARI LUAR USAHA		
Beban fungsional daerah (Catatan 22)		
Beban bank		
Denda pajak		
Lain-lain		
N JUMLAH		1.800.000.000

Gambar 3. 54 Daftar biaya lainnya
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 54 untuk daftar biaya lainnya diisi pada rincian biaya lainnya untuk Lampiran II. Untuk huruf L diisi pada biaya lainnya di bagian harga pokok penjualan, huruf M diisi pada bagian biaya usaha lainnya, huruf N diisi pada bagian biaya diluar usaha.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Kemudian mengisi Lampiran II sesuai dengan catatan atas laporan keuangan, sebagai berikut:

FORMULIR		LAMPIRAN - II			SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2 0 2 3	
1771- II		PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL						
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
IDENTITAS	N P W P :	05.006.007.8-009.010			NAMA WAJIB PAJAK :		M	
	PERIODE PEMBUKUAN :	1 23 s.d. 12 23						
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/ribu)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/ribu)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/ribu)	JUMLAH (Rp/ribu)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)			
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0				
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	A 5.000.000.000	D+H 2.000.000.000	0				
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0				
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	B+C 112.000.000	G+J 41.000.000	0				
5	BIAYA SEWA	0	E+I 339.000.000	0				
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0				
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0				
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0				
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0				
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	F 19.000.000	0				
11	BIAYA LAINYA	L 11.000.000.000	M 3.700.000.000	N 1.800.000.000				
12	PERSEDIAAN AWAL	-	-	-				
13	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)	0	0	0				
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13							

Gambar 3. 55 Lampiran II
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 55 untuk uraian no 2 pada kolom “Harga Pokok Penjualan” diisi dengan kode huruf A dan kolom “Biaya Usaha Lainnya” diisi dengan kode penjumlahan huruf D dengan H, uraian no 4 pada kolom “Harga Pokok Penjualan” diisi dengan kode penjumlahan huruf B dengan C dan “Biaya Usaha Lainnya” diisi dengan kode penjumlahan huruf G dengan J, uraian no 5 pada kolom “Biaya Usaha Lainnya” diisi dengan kode penjumlahan E dengan J, uraian no 10 pada kolom “Biaya Usaha Lainnya” diisi dengan kode huruf F, uraian no 11 pada kolom “Harga Pokok Penjualan” diisi dengan kode huruf L kemudian kolom Biaya Usaha Lainnya” diisi dengan kode huruf M dan “Biaya Dari Usaha Lainnya” diisi dengan kode huruf N.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

- p. Pada lampiran I, kolom No. 1, No. 2, No. 3 dan No.4 diisi sesuai dengan laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023 yang terdapat di Laporan Laba Rugi. Berikut tampilan laporan laba rugi PT M tahun 2023:

	Catatan	2023
Pendapatan	15	24.000.000.000
Beban pokok pendapatan	16	(18.000.000.000)
LABA BRUTO		6.000.000.000
Beban penjualan	17	(5.000.000.000)
Beban umum dan administrasi	18	(500.000.000)
RUGI USAHA		(500.000.000)
Pendapatan lain-lain	19	1.865.000.000
Beban lain-lain	20	(2.000.000.000)
Pendapatan keuangan		35.000.000
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		400.000.000

Gambar 3. 56 Laporan Laba Rugi pada LK Audited PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

Pada Gambar 3. 56 tertera bahwa pendapat sebesar Rp. 24.000.000.000 dan pendapatan dari luar usaha sebesar Rp. 1.900.000.000 yang diperoleh dari penambahan pendapatan lain-lain dengan pendapatan keuangan.

U
M
N
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Kemudian mengisi Lampiran 1 sesuai laporan laba rugi sebagai berikut:

FORMULIR		LAMPIRAN I	BUKA
1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
		TAHUN PAJAK 2023	
IDENTITAS NPWP : 05.006.007.8-009.010 NAMA WAJIB PAJAK : PT M PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23			
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a.	24.000.000.000
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b.	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c.	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d.	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e.	1.900.000.000
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f.	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g.	
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h.	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2.	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3.	
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4.	35.000.000

Gambar 3. 57 Lampiran I
 Sumber: Data Perusahaan

Pada Gambar 3. 57 merupakan tampilan lampiran I yang sudah diisi Penghasilan neto komersial dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian pada lampiran I kolom No 5 – No. 8 diisi sesuai dengan yang terdapat di catatan atas laporan keuangan No. 21 Bagian C pada laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023. Berikut catatan atas laporan keuangan No. 21:

	2023
Rugi sebelum pajak	(553.000.000)
Koreksi beda tetap :	
Beban perjamuan	22.000.000
Denda pajak	454.000
Jasa giro	(10.300.000)
Bunga deposito	(25.000.000)
Sebagian dari beban lain-lain	192.846.000
	180.000.000
Koreksi beda temporer :	
Beban imbalan kerja	(1.027.000.000)
Rugi fiskal	(1.400.000.000)

Gambar 3. 58 Laporan Laba Rugi pada LK *Audited* PT MMN 2023
 Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 58 tertera rugi fiskal sebesar Rp. 1.400.000.000. Kemudian pada lampiran I kolom no. 5 huruf l diisi sesuai nominal yang positif yaitu Rp. 22.000.000 ditambah dengan Rp. 454.000 dan Rp. 192.846.000 sehingga fiskal positif senilai Rp. 215.300.000. Kemudian untuk kolom no. 6 huruf d diisi sesuai nominal yang negatif yaitu Rp. 10.300.000 ditambah Rp 25.000.000 dan Rp. 1.027.000.000 sehingga fiskal negatif senilai Rp. 1.062.300.000.

5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
	a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a. 0	
	b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUJUKAN DANA CADANGAN.....	5b. 0	
	c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c. 0	
	d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d. 0	
	e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e. 0	
	f.	PAJAK PENGHASILAN	5f. 0	
	g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g. 0	
	h.	Sanksi Administrasi	5h. 0	
	i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i. 0	
	j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j. 0	
	k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0	
	l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l. 215.300.000	
m.	JUMLAH 5a s.d 5l :	5m. 215.300.000		
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF			
	a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0	
	b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b. 0	
	c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0	
	d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 1.027.000.000	
	e.	JUMLAH 6A s.d 6d	6e. 1.027.000.000	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:			
	TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7.	0	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)		8.	-1.400.000.000

Gambar 3. 59 Lampiran I No. 5-8
Sumber: Data Perusahaan

- q. Pada lampiran khusus 8A-6 Non Kualifikasi Bagian I diisi sesuai dengan Laporan Posisi Keuangan pada laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023. Berikut Laporan Posisi Keuangan PT M tahun 2023:

	Catatan	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	4	
Deposito	5	
Piutang usaha	6	
Piutang lain-lain	7	
Uang muka	8	
Persediaan		—
Jumlah Aset Lancar		—
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	21	
Aset tetap	9	
Aset tak berwujud		—
Jumlah Aset Tidak Lancar		—
JUMLAH ASET		17.000.000.000

Gambar 3. 60 Laporan Posisi Keuangan pada LK *Audited* PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

	Catatan	2023
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	10	
Utang pajak	21	
Utang lain-lain	11	
Akrual		—
Pendapatan ditangguhkan	12	—
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		—
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja karyawan	13	—
JUMLAH LIABILITAS		—
DEFISIENSI MODAL		
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham		—
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 30.000 saham	13	—
Saldo rugi		—
JUMLAH DEFISIENSI MODAL		—
JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL, BERSIH		17.000.000.000

Gambar 3. 61 Laporan Posisi Keuangan pada LK *Audited* PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 60 dan 3. 61 tertera informasi jumlah asset dengan jumlah liabilitas dan defisiensi modal sebesar Rp. 17.000.000.000. Kemudian memindahkan angka pada laporan posisi keuangan ke lampiran khusus 8A-6 bagian I, jika jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban dan ekuitas sudah *balance* dan sama dengan laporan posisi keuangan, maka penginputan sudah dilakukan dengan benar.

8A-6 NON-KUALIFIKASI		LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN		8A-6 TAHUN PAJAK 2023	
N P W P		05.006.007.8-009.010			
NAMA WAJIB PAJAK		PT M			
I. ELEMEN DARI NERACA					
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS		1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	INVESTASI SEMENTARA		2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA		3.	HUTANG BUNGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4.	HUTANG PAJAK	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU		7.	HUTANG BANK	
8.	PERSEDIAAN		8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN		10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA		11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG		12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	TANAH DAN BANGUNAN		13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA		14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN		15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI		16.	MODAL SAHAM	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD		18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20.	EKUITAS LAIN - LAIN	
JUMLAH AKTIVA		17.000.000.000	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.000.000.000

Gambar 3. 62 Lampiran Khusus 8A-6 Bagian I
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 62 pengisian elemen dari neraca sudah *balance* yaitu sebesar Rpp. 17.000.000.000 dan nominal tersebut sesuai dengan laporan posisi keuangan, maka pengisi telah dilakukan secara benar.

Bagian II diisi sesuai dengan Laporan Laba Rugi pada laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023.

	Catatan	2023
a Pendapatan	15	
b Beban pokok pendapatan	16	-
LABA BRUTO		
c Beban penjualan	17	-
Beban umum dan administrasi	18	-
RUGI USAHA		
d Pendapatan lain-lain	19	-
Beban lain-lain	20	-
Pendapatan keuangan		-
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		
e Manfaat (beban) pajak penghasilan	21	-
RUGI TAHUN BERJALAN		
Penghasilan komprehensif lain		
f Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	13	-
Pajak penghasilan terkait	21	-
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak		-
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.000.000.000

Gambar 3. 63 Laporan Laba Rugi pada LK Audited PT M 2023
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 63 diketahui kode untuk pengisian bagian pendapatan yaitu huruf A, beban pokok pendapatan yaitu huruf B, beban penjualan dan beban umum yaitu huruf C, Pendapatan dan beban lain yaitu huruf D, Manfaat (beban) pajak yaitu huruf E dan pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi yaitu huruf F.

Kemudian mengisi lampiran khusus 8A-6 Bagian II sesuai dengan laporan laba rugi seperti berikut ini:

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI		
NO	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
a	PENJUALAN BERSIH	
	PERSEDIAAN AWAL	0
b	PEMBELIAN	
	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	
c	BEBAN PENJUALAN	
	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	
d	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	
	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	
e	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	
f	POS LUAR BIASA	
	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	2.000.000.000

Gambar 3. 64 Lampiran Khusus 8A-6 Bagian II
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 64 diisi sesuai dengan kode huruf yang terdapat pada gambar 3. 63. Kemudian Bagian III terdapat di catatan atas laporan keuangan No. 19 laporan keuangan *audited* PT M tahun 2023.

Pengisian bagian III sesuai dengan isi di catatan atas laporan keuangan no. 19 sebagai berikut:

Pendapatan		
Pendapatan agen		
PT KMN		8.000.000.000
Pendapatan iklan		
PT IP		6.000.000.000
PT G		3.000.000.000
PT TAJ		44.000.000
PT BMG		39.000.000
PT HTM		5.000.000
Persentase terhadap jumlah pendapatan		

Gambar 3. 65 Catatan atas laporan keuangan No.19
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 65 tertera transaksi dari pihak berelasi yaitu PT KMN, PT IP, PT G, PT TAJ, PT BMG, PT HTM.

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
1	PT KMN PT IP PT G PT J PT BMG PT HTM	PENDAPATAN - AGEN	8.000.000.000
2		PENDAPATAN - IKLAN	6.000.000.000
3		PENDAPATAN - IKLAN	3.000.000.000
4		PENDAPATAN - IKLAN	44.000.000
5		PENDAPATAN - IKLAN	39.000.000
6		PENDAPATAN - IKLAN	5.000.000

Tambah Hapus Data ke- 13 Next Rows 1 to 6 of 13

Gambar 3. 66 Lampiran Khusus 8A-6 Bagian III
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 66 merupakan tampilan setelah dilakukan pengisian untuk transaksi-transaksi pihak berelasi sesuai dengan catatan atas laporan keuangan no 19.

- r. Pada Formulir Induk Lanjutan, kolom 14b dan 15a akan terisi secara otomatis.

INDUK LANJUTAN BUKA LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI BUKA KIRIM

Formulir 1771 Halaman 2

(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 8.750.000
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERNYATAAN TENTANG HUBUNGAN ISTIMEWA	16. <input checked="" type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT *) <input type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country	

Gambar 3. 67 Formulir Induk Lanjutan
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 67 merupakan tampilan formular induk lanjutan.

- s. Pada Formulir Induk, karena perusahaan ini mengalami rugi secara akuntansi dan fiskal, maka pada kolom 1c no.10 “PPh Yang Dibayar Sendiri” tidak diisi.

(1)	(2)	(3)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		
RUPIAH *)		
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL <small>(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)</small>	1 1.400.000.000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <small>(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)</small>	2 0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 0
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI <small>(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)</small>	8a 0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI <small>(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)</small>	8b 0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 0
	9. (6 – 7 – 8c) <input type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b 0
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 – 10c) <input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11 0
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL Tanggal <input type="text"/>	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

D.1.1.32.54

Gambar 3. 69 Formulir Induk
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 69 merupakan tampilan formulir induk.

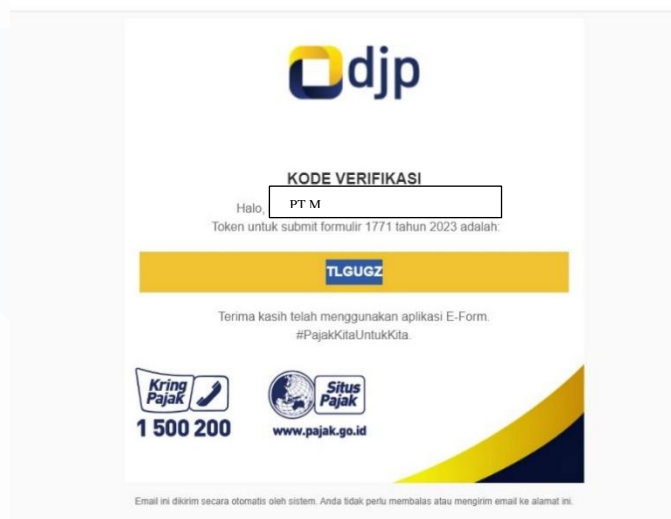
- t. Setelah selesai menginput SPT Tahunan PT M 2023, cetak *e-form* dan memberikan kepada senior staff untuk dilakukan pengecekan. Setelah diterima kembali maka e-form siap untuk dilaporkan.
- u. Pada formulir induk lanjutan klik “Kirim”.

INDUK LANJUTAN LAMPIRAN 8A - 8 NON KUALIFIKASI

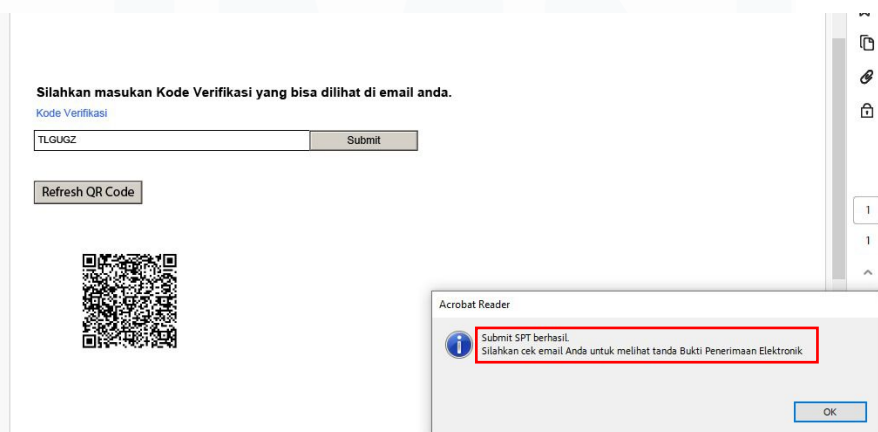
Gambar 3. 70 Menu “Kirim” pada Formulir Induk Lanjutan
Sumber: Data Perusahaan

Gambar 3. 70 merupakan tampilan bagian atas pada induk lanjutan.

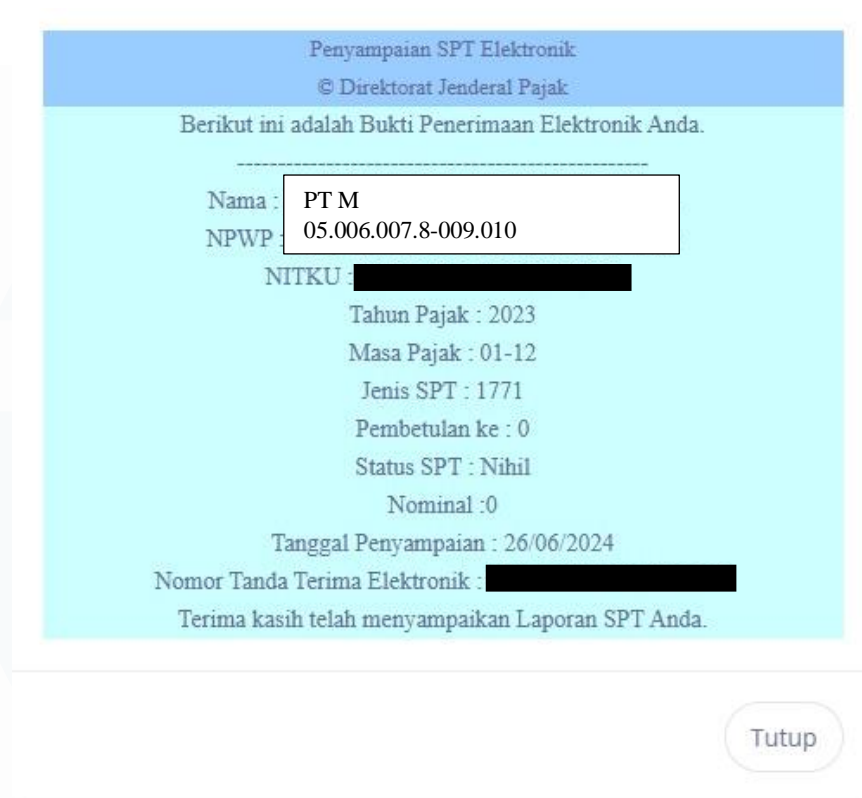
- v. Lalu unggah “Laporan Keuangan *Audited*” dan unggah “Dokumen Lampiran Lainnya”. Dokumen lampiran lainnya terdiri dari daftar biaya lainnya, daftar perusahaan, *e-cbcr* tahun 2022 dan daftar perusahaan. Semua dokumen lainnya telah digabung menjadi satu file dalam format .pdf. Lalu buka *email* perusahaan untuk melihat kode verifikasi yang telah diterima saat awal mengunduh e-form dan mengisi kolom “Kode Verifikasi” dengan “TLGUGZ” klik “*Submit*”. Maka secara otomatis akan menerima BPE melalui email.



Gambar 3. 72 Kode Verifikasi
Sumber: Data Perusahaan



Gambar 3. 71 Tampilan submit berhasil
Sumber: Data perusahaan



Gambar 3. 73 Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan PT M Tahun 2023
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 73 merupakan tampilan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik), jika sudah mendapat BPE maka pengisian dan pelaporan telah selesai dilakukan.

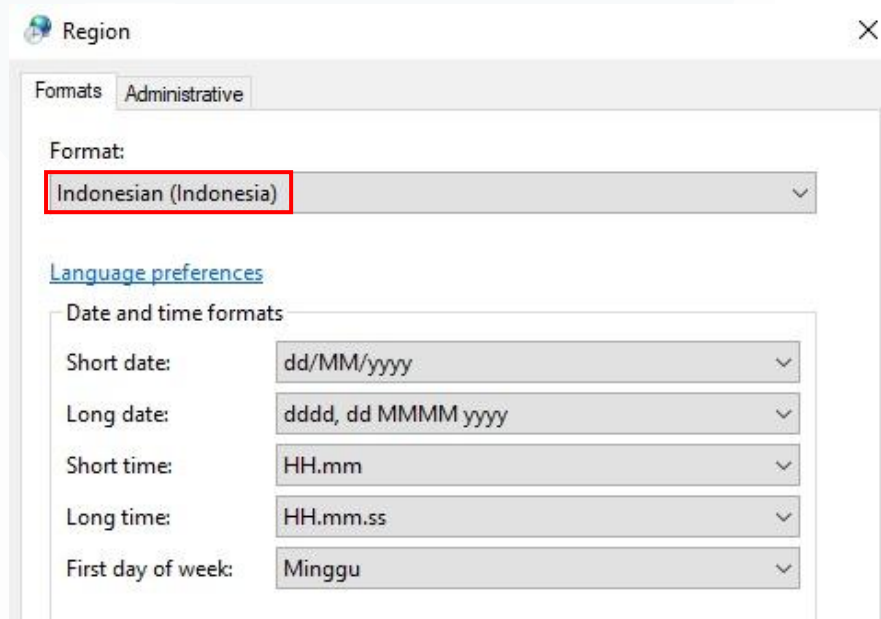
3.3.6 Menyusun Lampiran 1A (Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal) untuk SPT Tahunan Badan 1771 sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Lampiran IA (Daftar Penyusutan dan Amortisasi) dalam SPT Tahunan Badan bertujuan untuk melaporkan perhitungan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud yang dimiliki oleh badan usaha. Lampiran ini mencatat nilai penyusutan atau amortisasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi rinci terkait perhitungan dan pengakuan biaya penyusutan/amortisasi sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga otoritas pajak dapat memverifikasi kewajiban pajak badan usaha

secara akurat. Unit usaha yang dilakukan penyusunan Lampiran IA adalah PT M dan PT AIM dikerjakan dalam periode bulan Juni 2024, PT DI dikerjakan dalam periode bulan Juli 2024 dan PT RS dikerjakan dalam periode bulan Agustus 2024. Dokumen yang diperlukan adalah *asset report* PT M tahun 2023, ketentuan lampiran sesuai aturan DJP dan catatan atas laporan keuangan PT M tahun 2023 dalam bentuk *softcopy*.

Berikut langkah-langkah menyusun Lampiran 1A untuk SPT Tahunan Badan 1771 sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak pada PT M tahun 2023:

- a. Sebelum mengerjakan, pada komputer perusahaan perlu diubah *region*-nya menjadi Indonesia agar bisa di impor ke SPT Tahunan Badan 1771.



Gambar 3. 74 *Setting Region*

Sumber: Data Perusahaan

Gambar 3. 74 merupakan tampilan *setting* untuk mengubah *region*.

- b. Menerima *asset report* PT M tahun 2023 untuk aset berwujud dan aset tidak berwujud dari *senior staff*.

Berikut *asset report* untuk aset berwujud:

TITLE	ASSET REPORT						
AS OF DATE	2023-12-01						
					Harga perolehan	Akumulasi s.d th lalu	Penyusutan th berjalan
NO	PRODUCT NAME	ECONOMICAL LIFETIME	ECONOMIC	RECEIVING DATE	RECEIVING AMOUNT		DEPRECIATION YTD
1	pc rakitan	48	48	16 2022-09-20	4,250,000		354,166
2	pc rakitan	48	48	16 2022-09-20	28,300,000		2,358,333
3	pc rakitan	48	48	16 2022-09-20	28,300,000		2,358,333
4	Saramonic UWMic9	48	48	16 2022-09-20	4,270,000		355,833
5	SWITCH - 24 PORT	48	48	16 2022-09-20	4,400,000		366,666
6	MICROPHONE WIRELESS	48	48	16 2022-09-20	2,149,000		179,083
7	LTE Mikrotik Client	48	48	16 2022-09-21	1,980,000		165,000
8	Rebounder TS-002 AB	48	48	16 2022-09-26	4,750,000		395,833
9	LAPTOP	48	48	36 2021-01-28	12,100,000		6,050,000
10	pc rakitan	48	48	25 2021-12-17	17,100,000		4,631,250
11	CAMERA SONY A6400 Kit 18-105mm	48	48	23 2022-02-18	18,322,400		4,198,883
12	ZOOM H6 HANDY RECORDER	48	48	23 2022-02-18	4,362,300		999,694
13	Pkt Godox 500C LED Video Light Studi	48	48	23 2022-02-18	3,874,550		887,918
14	Video Tripod TAKARA ROVER 77 Fluid	48	48	23 2022-02-18	863,550		197,897
15	pc rakitan	48	48	21 2022-04-12	4,550,000		853,125
16	pc rakitan	48	48	21 2022-04-25	21,500,000		4,031,250

Gambar 3. 75 *Asset Report* untuk Aset Tak Berwujud
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 75 merupakan tampilan *list asset report* dari aset berwujud.

Berikut *asset report* untuk aset tak berwujud:

TITLE	ASSET REPORT								
AS OF DATE	2023-12-01								
					Harga perolehan	Akumulasi s.d th lalu	Penyusutan th ini	Akumulasi s.d th ini	Nilai buku
NO	PRODUCT NAME	ECONOMIC	ECONOMIC	RECEIVING DATE	RECEIVING AMOUNT		DEPRECIATION YTD	DEPRECIATION AS OF MON	BOOK VALUE
565	Software	48	48		42,526,140	42,526,140	-	42,526,140	-
566	windows 10	48	34	2020-03-01	1,500,000	1,062,500	375,000	1,437,500	62,500
567	windows 10	48	35	2020-02-01	1,500,000	1,093,750	375,000	1,468,750	31,250
					45,526,140	44,682,390	750,000	45,432,390	93,750

Gambar 3. 76 *Asset Report* untuk Aset Berwujud
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 76 merupakan tampilan *list asset report* dari aset tak berwujud.

- c. Kemudian membuat serta mengisi template excel sesuai dengan ketentuan.

2. 1771-LAMPIRAN KHUSUS 1A (DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL)
Pada lampiran khusus 1A ini terdapat Daftar Penyusutan Fiskal dan Daftar Amortisasi Fiskal.
" Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi eForm, harap pastikan file csv yang akan Anda impor sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut ditutup terlebih dahulu. "

- o **Jenis Harta**, diisi dengan Kode Jenis Harta sesuai penulisan Kode, terdapat pembagian untuk Daftar Penyusutan dan Amortisasi, sebagai berikut:

Kode	Keterangan	Daftar
1	Harta Berwujud	Penyusutan Fiskal
2	Kelompok Bangunan	Penyusutan Fiskal
3	Harta Tak Berwujud	Amortisasi Fiskal

- o **Kelompok Harta** diisi dengan Kode Kelompok Harta sesuai penulisan Kode, terdapat perbedaan antara Penyusutan Fiskal dan Amortisasi Fiskal, sebagai berikut:

a. Penyusutan Fiskal

Kode	Keterangan
1	Kelompok 1
2	Kelompok 2
3	Kelompok 3

4	Kelompok 4
5	Permanen
6	Tidak Permanen

b. Amortisasi Fiskal

Kode	Keterangan
1	Kelompok 1
2	Kelompok 2
3	Kelompok 3
4	Kelompok 4
5	Kelompok Lain-Lain

- o **Jenis Usaha**, diisi dengan 2 digit angka yang merupakan penggabungan dari kode Jenis Harta dan Kelompok Harta, contoh : 12 (yang berarti angka 1 diawal menandakan kode Jenis Harta, angka 2 menandakan kode Kelompok Harta)
- o **Nama Harta** diisi dengan nama harta yang mengalami Penyusutan Fiskal maupun Amortisasi Fiskal.
- o **Bulan Perolehan** diisi dengan bulan diperolehnya harta (penulisan dalam bentuk angka 1-12).
- o **Tahun Perolehan** diisi dengan tahun diperolehnya harta.
- o **Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun** diisi dengan nilai Rupiah atas Sisa Buku Fiskal Awal Tahun diperolehnya harta (tanpa menggunakan titik atau koma), contoh : untuk 250.000 diisi 250000
- o **Metode Penyusutan Komersial** diisi dengan Kode Metode Penyusutan Komersial sesuai penulisan Kode, untuk kode daftar Penyusutan Fiskal dan daftar Amortisasi Fiskal, sebagai berikut:

Kode	Keterangan
1	GL - Garis Lurus
2	JAT - Jumlah Angka Tahun
3	SM - Saldo Menurun
4	SMG - Saldo Menurun Ganda
5	JJJ - Jumlah Jam Jasa
6	JSP - Jumlah Satuan Produksi
7	ML - Metode Lainnya

- o **Metode Penyusutan Fiskal** diisi dengan Kode Metode Penyusutan Fiskal sesuai penulisan Kode, untuk kode daftar Penyusutan Fiskal dan daftar Amortisasi Fiskal, sebagai berikut:

Kode	Keterangan
1	GL - Garis Lurus
2	SM - Saldo Menurun

- o **Penyusutan Fiskal Tahun Ini** diisi dengan nilai Rupiah atas Penyusutan fiskal tahun ini atas harta yang diperoleh (tanpa menggunakan titik atau koma), contoh : untuk 250.000 diisi 250000
- o **Catatan** diisi dengan keterangan atas harta.

Gambar 3. 77 Ketentuan Lampiran Khusus 1A
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 77 merupakan ketentuan lampiran yang diatur oleh DJP yang terdapat bagian-bagian yang perlu dibuat pada *template* penyusutan sebagai berikut:

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jenis Harta	Kelompok Harta	Jenis Usaha	Nama Harta	Bln Perolehan	Thn Perolehan	Jenis Penyusutan Komersial	Jenis Penyusutan Fiskal	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Penyusutan fiskal tahun ini	Keterangan nama harta

Gambar 3. 78 Template Penyusutan dan Amortisasi sesuai Ketentuan
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 78 terdapat kolom Jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini dan keterangan nama harta.

- d. Kemudian mengisi “Jenis Harta, Kelompok Harta, Jenis Usaha, Nama Harta, Bulan Perolehan dan Tahun Perolehan” pada *template excel* sesuai *asset report*.

1	TITLE	ASSET REPORT				1	Jenis Harta	Kelompok Harta	Jenis Usaha	Nama Harta	Bln Perolehan	Thn Perolehan
2	AS OF DATE	2023-12-01				2	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
3						3	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
4						4	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
5						5	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
6						6	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
7						7	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
8						8	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022
9						9	1	1	1	11 INVENTARIS	9	2022

4	NO	PRODUCT NAME	ECONOMICAL LIFETIME	ECONOMIC	RECEIVING DATE
5	1	pc rakitan	48	16	2022-09-20
6	2	pc rakitan	48	16	2022-09-20
7	3	pc rakitan	48	16	2022-09-20
8	4	Saramonic UWMic9	48	16	2022-09-20

Gambar 3. 79 Asset Report dan Template Penyusutan
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 79 merupakan aset berwujud, maka pada “Jenis Harta” diisi 1 karena termasuk harta berwujud, kemudian pada “Kelompok Harta” diisi 1 karena pada *asset report* diketahui *economical lifetime* selama 48 bulan (4 tahun). “Jenis Usaha” diisi 11 karena sesuai dengan ketentuan, Jenis Usaha merupakan penggabungan dari kode Jenis Harta dan Kelompok Harta. Kemudian untuk “Nama Harta” diisi mengikuti tahun lalu dan sesuai kebijakan perusahaan yaitu “INVENTARIS”. Lalu untuk “Bulan Perolehan dan Tahun Perolehan” diisi sesuai *receiving date* pada *asset report* yaitu bulan 9 dan tahun 2022.

1	TITLE	ASSET REPORT				1	Jenis Harta	Kelompok Harta	Jenis Usaha	Nama Harta	Bln Perolehan	Thn Perolehan
610	AS OF DATE	2023-12-01				610						
611						611	3	1	31	SOFTWARE	3	2020
612						612	3	1	31	SOFTWARE	2	2020
613						613						
614						614						
615						615						
616						616						

	NO	PRODUCT NAME	ECONOMIC	ECONOMIC	RECEIVING DATE
	566	windows 10 pro 64bit	48	34	2020-03-01
	567	windows 10 pro 64bit	48	35	2020-02-01

Gambar 3. 80 Asset Report dan Template Amortisasi
Sumber: Data perusahaan

Pada gambar 3. 80 merupakan aset tak berwujud, maka pada “Jenis Harta” diisi 3 karena termasuk harta tak berwujud, kemudian pada “Kelompok Harta” diisi 1 karena pada *asset report* diketahui *economical lifetime* selama 48 bulan (4 tahun). “Jenis Usaha” diisi 31 karena sesuai dengan ketentuan, Jenis Usaha merupakan penggabungan dari kode Jenis Harta dan Kelompok Harta. Kemudian untuk “Nama Harta” diisi mengikuti tahun lalu dan sesuai kebijakan perusahaan yaitu “SOFTWARE”. Lalu untuk “Bulan Perolehan dan Tahun Perolehan” diisi sesuai *receiving date* pada *asset report* yaitu bulan 2 dan tahun 2020.

- e. Kemudian mengisi “Jenis Penyusutan Komersial dan Jenis Penyusutan Fiskal” pada *template excel* sesuai *asset report*.

Jenis Penyusutan Komersial	Jenis Penyusutan Fiskal
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

Gambar 3. 82 Ketentuan Lampiran Khusus 1A
Sumber: Data Perusahaan

PT M

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

g. ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

Aset tetap pada saat perolehan diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan **metode garis lurus** berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis, kecuali tanah tidak disusutkan, dari aset tetap bersangkutan sebagai berikut :

Gambar 3. 81 Catatan atas laporan keuangan Bagian g PT M tahun 2023
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3. 81 “Jenis Penyusutan Komersial” dan “Jenis Penyusutan Fiskal” diisi 1, karena berdasarkan catatan atas laporan keuangan PT M bagian g penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Sehingga, baik aset berwujud dan aset tak berwujud diisi dengan angka 1 pada “Jenis Penyusutan Komersial” dan “Jenis Penyusutan Fiskal”.

- f. Kemudian mengisi “Harga Perolehan, Nilai Sisa Buku, Penyusutan Fiskal Tahun Ini dan Keterangan Nama Harta” pada *template excel* sesuai *asset report*.

1	TITLE	ASSET REPORT			1	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Penyusutan Fiskal Tahun Ini	Keterangan Nama Harta
2	AS OF DATE	2023-12-01			2	4250000	3895834	1062499	pc rakitan
3			Harga perolehan	Akumulasi s.d th lalu	3	28300000	25941667	7074999	pc rakitan
4	NO	PRODUCT NAME	RECEIVING AMOUNT	DEPRECIATION YTD	4	28300000	25941667	7074999	pc rakitan
5	1	pc rakitan	4,250,000	354,166	5	4270000	3914167	1067500	Saramonic UWMic9
6	2	pc rakitan	28,300,000	2,358,333	6	4400000	4033334	1099999	SWITCH 24 PORT
7	3	pc rakitan	28,300,000	2,358,333	7	2149000	1969917	537249	MICROPHONE WIRELESS
8	4	Saramonic UWMic9	4,270,000	355,833	8	1980000	1815000	495000	LTE Mikrotik Client
					9	4750000	4354167	1187500	Rebounder TS 002 AB

Gambar 3. 84 *Asset Report* dan *Template* Penyusutan
Sumber: Data Perusahaan

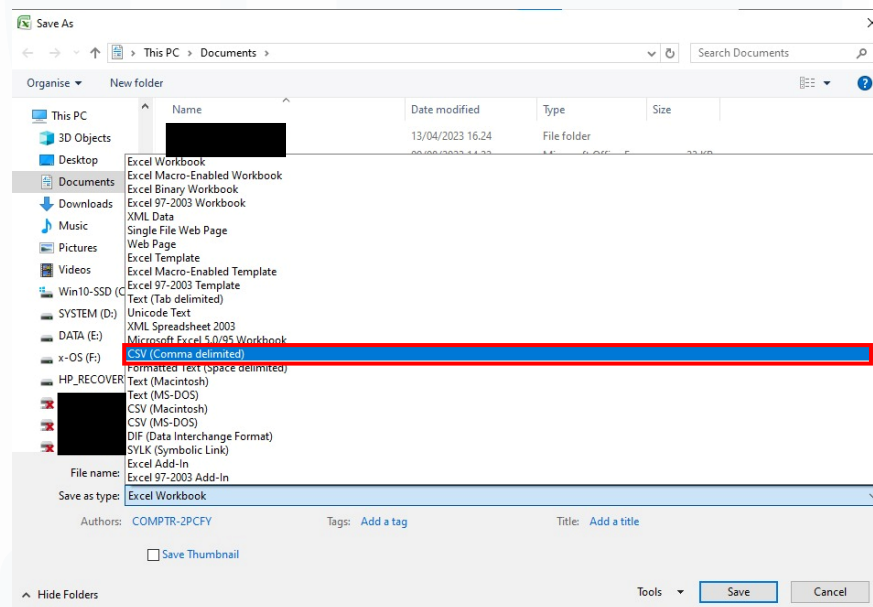
Pada gambar 3. 84 merupakan aset berwujud, “Harga Perolehan” diisi sesuai dengan asset report yaitu senilai Rp. 4.250.000 dan Rp. 28.300.000. Kemudian, “Nilai Sisa Buku” didapatkan dari “Harga Perolehan” dikurangi “Akumulasi s.d th lalu”, sehingga pada aset nomor 1 “Nilai Sisa Buku” sebesar Rp. 3.895.834 yang didapat dari Rp 4.250.000 dikurangi Rp. 354.166 dan pada aset nomor 2 “Nilai Sisa Buku” sebesar Rp. 25.941.667 yang didapat dari Rp. 28.300.000 dikurangi Rp. 2.358.333. Lalu, pada “Penyusutan Fiskal Tahun Ini” diisi sesuai dengan penyusutan tahun berjalan pada *asset report* yaitu sebesar Rp. 1.062.499 untuk aset nomor 1 dan Rp. 7.074.999 untuk aset nomor 2. “Keterangan Nama Harta” diisi sesuai dengan *product name* pada *asset report*.

TITLE	ASSET REPORT				1	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Penyusutan Fiskal Tahun Ini	Keterangan Nama Harta
AS OF DATE	2023-12-01				610				
		Harga perolehan	Akumulasi s.d th lalu	Penyusutan th ini	611	1500000	437500	375000	windows 10 pro 64bit 610
NO	PRODUCT NAME	RECEIVING AMOUNT		DEPRECIATION YTD	612	1500000	406250	375000	windows 10 pro 64bit 611
566	windows 10 pro 64bit	1,500,000	1,062,500	375,000	613				
567	windows 10 pro 64bit	1,500,000	1,093,750	375,000	614				
					615				
					616				
					617				
		45,526,140	44,682,390	750,000	...				

Gambar 3. 83 *Asset Report* dan *Template* Amortisasi
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 83 merupakan aset tak berwujud, “Harga Perolehan” diisi sesuai dengan *asset report* yaitu senilai Rp. 1.500.000. Kemudian, “Nilai Sisa Buku” didapatkan dari “Harga Perolehan” dikurang “Akumulasi s.d th lalu”, sehingga pada aset nomor 567 “Nilai Sisa Buku” sebesar Rp. 406.250 yang didapat dari Rp 1.500.000 dikurangi Rp. 1.093.750. Lalu, pada “Penyusutan Fiskal Tahun Ini” diisi sesuai dengan penyusutan tahun berjalan pada *asset report* yaitu sebesar Rp. 375.000. “Keterangan Nama Harta” diisi sesuai dengan *product name* pada *asset report*.

- g. Simpan file dengan tipe *CSV (Comma Delimited)* sesuai dengan ketentuan.



Gambar 3. 85 Tampilan saat menyimpan dengan tipe “CSV”

Sumber: Data perusahaan

Pada gambar 3. 85 merupakan tampilan saat ingin menyimpan file dalam bentuk *CSV*.

3.3.7 Menyusun daftar nominatif dengan menggunakan SAP untuk menyesuaikan datanya.

Saat ingin melaporkan SPT Tahunan Badan 1771, dibutuhkan daftar nominatif untuk memastikan bahwa biaya yang diakui oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dapat dibuktikan keabsahannya. Daftar nominatif ini membantu otoritas pajak dalam melakukan verifikasi, pengawasan, dan menghindari klaim biaya yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dihitung lebih

akurat dan transparan. Unit usaha yang dilakukan penyusunan daftar nominatif PT UB, PT G dan PT PSB dikerjakan pada periode bulan Juli 2024, PT KCM dikerjakan pada periode bulan Agustus 2024 dan PT MNP dikerjakan pada periode bulan September 2024. Dokumen yang diperlukan adalah daftar kode biaya promosi dan *template* daftar nominatif dalam bentuk *softcopy*.

Berikut langkah-langkah menyusun daftar nominatif PT UB tahun 2023:

- a. Mendapatkan daftar kode biaya promosi PT UB tahun 2023 dari *senior staff*.

Assignment	Document Number	Business Area	Document Type	Document Date	Posting Key	Amount in local currency	Local Currency	Tax code	Clearing Document	Text
17000013392023	1700001339	CW01	KR	02/10/2023	50	-35	IDR			UB UMB JUL23 GADS 40CCL23DDCF BOOSTING
17000013392023	1700001339	CW01	KR	02/10/2023	50	-32.214	IDR			UB UMB JUL23 GADS 40CCL23DDCM BOOSTING
17000013402023	1700001340	CW01	KR	26/10/2023	40	721.800	IDR			UB UKGMS SEP23 RK 15-4934 40CCP23OSHA SOUVE
17000016262023	1700001626	CW01	KR	04/12/2023	40	87.000	IDR			UB UMB SEP23 SKG BARANG 40CCI23DBOB BMKED
17000017132023	1700001713	CW01	KR	24/01/2024	40	825.000	IDR			GOPAY DOORPIZE & KAHOOT TOWNHALL
17000017132023	1700001713	CW01	KR	24/01/2024	40	8.000	IDR			ADM GOPAY
85000000342023	8500000034	CW01	Y0	05/07/2023	40	101.500	IDR			Ongkos kirim
85000000602023	8500000060	CW01	Y0	05/07/2023	40	3.975.000	IDR			Tumbler MEDIO sablon 1 sisi
85000000602023	8500000060	CW01	Y0	05/07/2023	40	1.837.500	IDR			Totebag MEDIO kanvas putih uk 35 x 40 cm sablon 1
85000000692023	8500000069	CW01	Y0	08/09/2023	40	300.000	IDR			Snack crew
85000000782023	8500000078	CW01	Y0	05/10/2023	40	1.702.703	IDR			Flyer Pasang Iklan KG Media uk A5
85000001122023	8500000111	CW01	Y0	29/12/2023	40	5.000.000	IDR			Sewa studio 2 lt. 2 Podium Menara KOMPAS
85000001132023	8500000113	CW01	Y0	29/12/2023	40	125.000	IDR			Makan Siang Valentine Kru
85000001182023	8500000118	CW01	Y0	29/12/2023	40	7.500.000	IDR			Sewa Lighting System
85000001192023	8500000119	CW01	Y0	29/12/2023	40	5.000.000	IDR			Sewa Paket Sound System

Gambar 3. 86 Daftar Kode Biaya Promosi PT UB
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 86 merupakan tampilan daftar kode biaya promosi yang diberikan staff senior dalam bentuk *excel*.

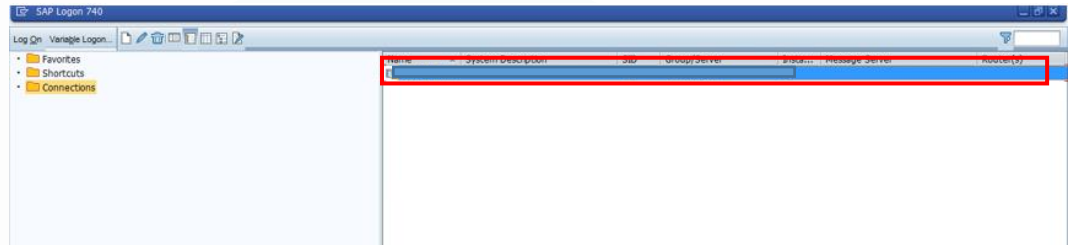
- b. Membuka *software SAP Logon* pada komputer kantor.



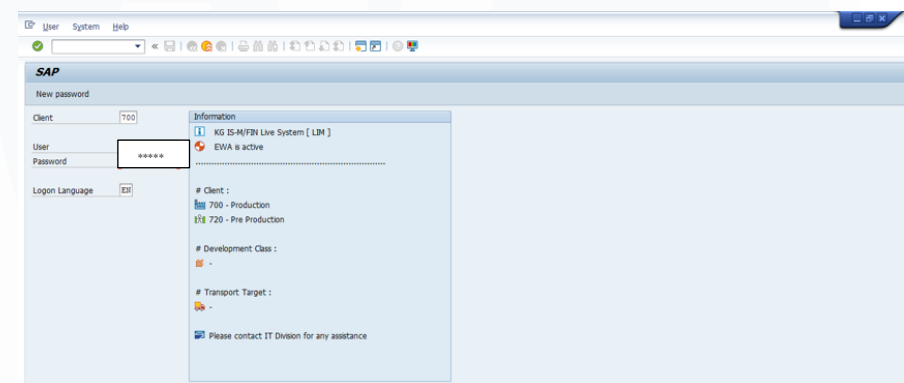
Gambar 3. 87 Software SAP Logon
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 87 merupakan tampilan *software SAP* yang akan digunakan untuk melihat detail biaya promosi.

- c. Kemudian klik yang paling atas, lalu memasukan *User* dan *Password* SAP perusahaan.



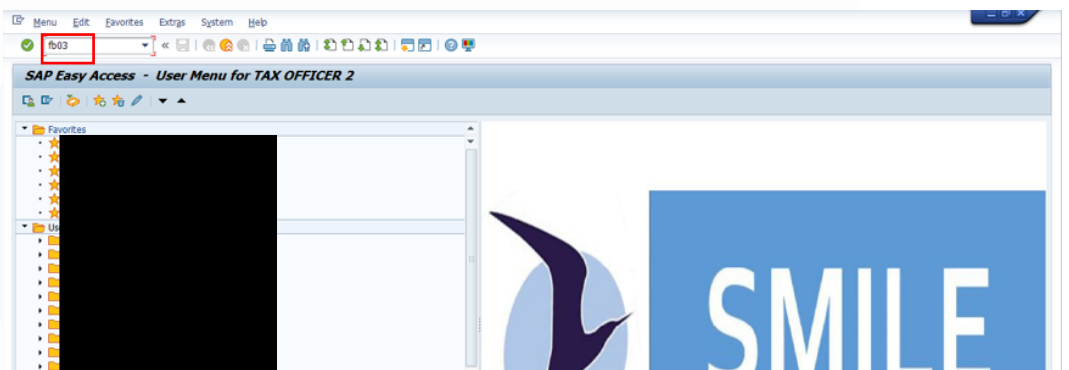
Gambar 3. 89 Tampilan awal software SAP
Sumber: Data Perusahaan



Gambar 3. 88 Tampilan Login SAP
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 89 dan 3. 90 merupakan tampilan awal pada SAP.

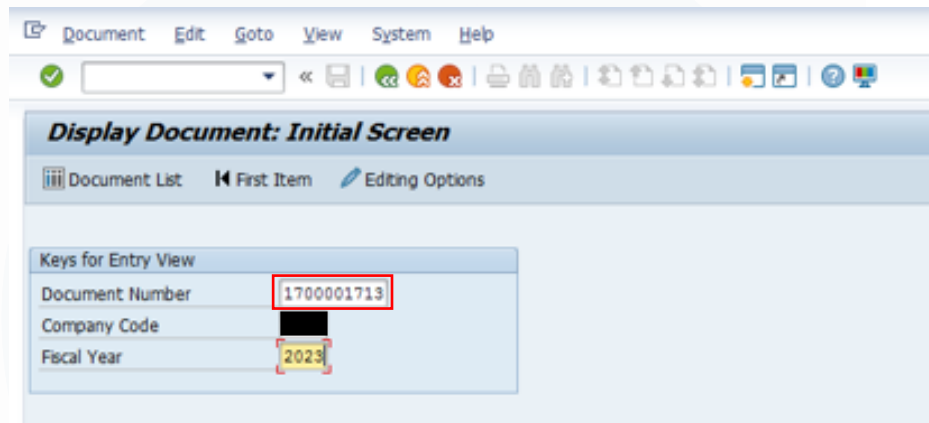
- d. Lalu *search* “FB03”, kemudian klik *enter*.



Gambar 3. 90 Tampilan menu *search* pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 90 merupakan tampilan menu *search* untuk mencari menu “FB03”.

- e. Setelah itu, masukan “*Document Number*” yang berasal dari daftar kode biaya promosi yang diberikan senior staff, “*Company Code*” dan “*Fiscal Year*”.



Gambar 3. 91 Tampilan “*Display Document*” pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

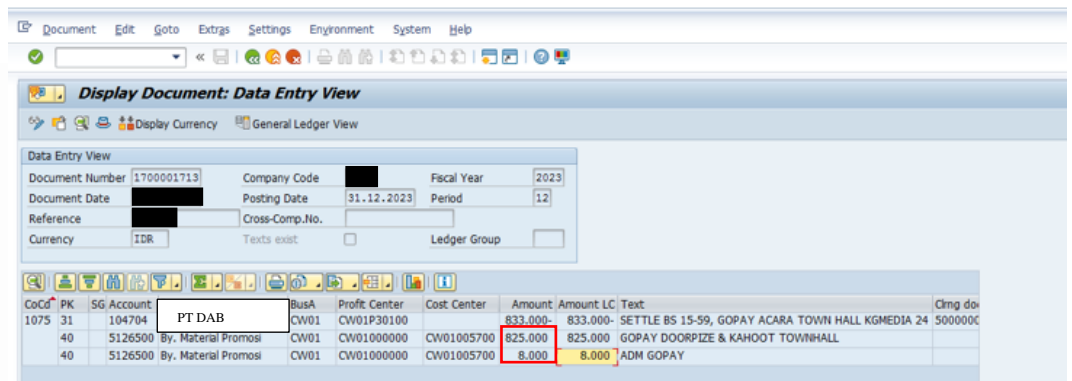
pada gambar 3. 91 merupakan tampilan untuk memasukan dokumen *number*, *company code* dan tahun fiskal yang ingin dilihat.

Assignment	Document Number
17000017132023	1700001713
17000017132023	1700001713

Gambar 3. 92 Daftar Kode Biaya Promosi PT UB
Sumber: Data Perusahaan

Gambar 3. 92 merupakan tampilan untuk daftar kode biaya promosi yang ingin dilihat pada SAP.

- f. Kemudian cocokan *amount* di SAP dengan di data *excel* apakah sesuai atau tidak.



Gambar 3. 94 Tampilan *Display Document* pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 93 tertera Biaya promosi sebesar Rp 825.000 dan Rp. 8.000 dengan keterangan “*Gopay doorprize*” dan “*Adm Gopay*”. Kemudian mencocokkan dengan yang tertera di daftar kode biaya sebagai berikut:

Assignment	Document Number	Business Area	Document Type	Document Date	Posting Key	Amount in local currency	Local Currency	Tax code	Clearing Document	Text
17000017132023	1700001713	CW01	KR	24/01/2024	40	825.000	IDR			GOPAY DOORPRIZE & KAHOOT TOWNHALL
17000017132023	1700001713	CW01	KR	24/01/2024	40	8.000	IDR			ADM GOPAY

Gambar 3. 93 Daftar Kode Biaya Promosi PT UB
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 94 daftar kode biaya juga terdapat Biaya promosi sebesar Rp 825.000 dan Rp. 8.000 dengan keterangan “*Gopay doorprize*” dan “*Adm Gopay*” sesuai dengan data di SAP. Maka untuk *document number* tersebut telah sesuai.



- g. Kemudian klik baris data yang sesuai untuk melihat detail nama perusahaan serta alamat perusahaan tersebut.

The screenshot shows the SAP 'Display Document: Line Item 001' interface. The Vendor field is highlighted with a red box and contains the text 'PT DAB Jakarta Selatan'. Other visible fields include Company Code, PT Uninet Bhaktinusa, Doc. no. 1700001713, Line Item 1 / Invoice / 31, Amount 833.000 IDR, Tax code, Additional Data (Bus. Area, Disc. base, Payt. Terms, Bline Date, Pmnt. Block, Payment cur., Pmnt. Method, Payment Ref., Clearing, Assignment 17000017132023, Text SETTLE BS 15-59, GOPAY ACARA TOWN HALL KG MEDIA 24), and a 'Long text' button.

Gambar 3. 95 Tampilan Detail *Display Document* pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 95 merupakan tampilan setelah melakukan klik pada baris data yang sesuai di SAP. Tertera informasi bahwa biaya promosi dilakukan dengan PT DAB dan beralamat di Jakarta Selatan.

- h. Lalu untuk NPWP dilihat dari daftar nominatif tahun lalu, kemudian sesuaikan dengan nama perusahaannya.

Nama Wajib Paja :	PT UB
NPWP :	
Alamat :	
Tahun Pajak :	2022

No.	Nama	NPWP	Alamat
4	PT DAB	08.009.010.1-012.013	Jakarta Selatan

Gambar 3. 96 Daftar Nominatif PT UB tahun 2022
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 96 merupakan tampilan daftar nominatif untuk melihat NPWP dari PT DAB, diketahui NPWP PT DAB yaitu 08.009.010.1-012.013.

Pada gambar 3. 98 merupakan tampilan *template excel* yang akan digunakan untuk rekapitulasi.

		000202310
		000202320
		000202330
		000202340
		000202350
		000202360
		000202370
		000202380
		000202390
		0002023100
		0002023110
		0002023122

Gambar 3. 99 SPT Masa PPN periode Januari-Desember 2023
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 99 merupakan SPT Masa PPN periode Januari – Desember 2023 yang akan dimasukkan kedalam rekapitulasi.

- b. Kemudian mengisi kolom “Status” dan nilai DPP dan PPN pada “PPN-Keluaran”.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA/NPWP :	PT J 07.008.009-1-011.012	MASA :	01 - 01 - 2023 Perubahan Ke 0 (nol)	(mm-ttmm-yyyy)
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2	1.900.000.000 734.000.000	209.000.000 80.740.000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung				0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah IB.2)		1	2.000.000.000	220.000.000
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2	634.000.000	69.740.000
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4	0,00	0,00

Gambar 3. 100 SPT Masa PPN periode Januari-Desember 2023
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	Status	PPN-K	
			DPP	PPN
1	Jan	N	1.266.000.000	139.260.000
2	Feb			
3	Mar			
4	Apr			
5	Mei			
6	Jun			
7	Jul			
8	Agu			
9	Sep			
10	Okt			
11	Nov			
12	Des			
TOTAL			1.266.000.000	139.260.000

Gambar 3. 101 *Template* Rekapitulasi PPN-K
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 101 diketahui Pembetulan ke-0, maka pada SPT Masa PPN bulan Januari tidak ada pembetulan dan statusnya normal. Kemudian pada gambar 3. 103 untuk “DPP PPN-K” diperoleh dari kolom C No. 1 baris DPP dikurangi kolom B No. 2 baris DPP, maka “DPP PPN-K” bulan Januari senilai Rp. 1.266.000.000 yang didapatkan dari Rp. 2.000.000.000 dikurangi Rp. 734.000.000. Lalu untuk “PPN PPN-K” diperoleh dari diperoleh dari kolom C No. 1 baris PPN dikurangi kolom B No. 2 baris PPN, maka “PPN PPN-K” bulan Januari senilai Rp. 139.260.000 yang didapatkan dari Rp. 220.000.000 dikurangi Rp. 80.740.000.

c. Lalu mengisi kolom nilai DPP dan PPN pada “PPN-Keluaran Gunggung”.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA/RNP : PT TAJ NPWP : 07.008.009-1-011.012		MASA : 01 - 01 - 2023 (mm-tt-yyy) Pembetulan Ke : 0 (nol)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP				0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	1.900.000.000	209.000.000		0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	734.000.000	80.740.000		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah LB.2)	2.000.000.000	220.000.000		0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	634.000.000	69.740.000		0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	0,00	0,00		0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (jumlah LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	0,00	0,00		0,00

Gambar 3. 102 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	PPN-K GUNGGUNG	
		DPP	PPN
1	Jan	734,000,000	80,740,000
2	Feb		
3	Mar		
4	Apr		
5	Mei		
6	Jun		
7	Jul		
8	Agu		
9	Sep		
10	Okt		
11	Nov		
12	Des		
TOTAL		734,000,000	80,740,000

Gambar 3. 103 Template Rekapitulasi PPN-K Gunggung
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 103 nilai DPP “PPN-K Gunggung” adalah senilai Rp. 734.000.000 dan PPN “PPN-K Gunggung” senilai Rp. 80.740.000, angka tersebut berdasarkan SPT Masa PPN bulan Januari kolom B No.2.

- d. Lalu mengisi kolom nilai DPP dan PPN pada “PPN-Keluaran Pemungut”

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA NPWP :	PT TAJ 07.008.009-1-011.012	MASA :	01 - 01 - 2023 (mm-tttt-yyyy)	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1.	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	1.900.000.000	209.000.000
2.	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		734.000.000	80.740.000
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07, 08, 09 dan 09 ditambah I.B.2)	1	2.000.000.000	220.000.000
2.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08 dan 09)	2	634.000.000	69.740.000
3.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00

Gambar 3. 104 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	PPN-K PEMUNGUT	
		DPP	PPN
1	Jan	634,000,000	69,740,000
2	Feb		
3	Mar		
4	Apr		
5	Mei		
6	Jun		
7	Jul		
8	Agu		
9	Sep		
10	Okt		
11	Nov		
12	Des		
TOTAL		634,000,000	69,740,000

Gambar 3. 105 Template Rekapitulasi PPN-K Pemungut
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 105 nilai DPP “PPN-K Pemungut” adalah senilai Rp. 634.000.000 dan PPN “PPN-K Pemungut” senilai Rp. 69.740.000, angka tersebut berdasarkan SPT Masa PPN bulan Januari kolom C No.2.

- e. Lalu mengisi kolom nilai DPP dan PPN pada “PPN Tidak Dipungut dan “PPN Dibebaskan”.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)		
NAMA NPDP : PT TAJ NPWP : 07.008.009-1-011.012		MASA : 01 / 01 / 2023 (mm-tt-yy) Pembetulan Ke : 0 (nol)		
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	1.900.000.000	209.000.000	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		734.000.000	80.740.000	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (Lamp. IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah IB.2)	1	2.000.000.000	220.000.000	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Lamp. IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	634.000.000	69.740.000	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya tidak dipungut (Lamp. IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Lamp. IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

Gambar 3. 106 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	PPN Tidak Dipungut		PPN Dibeaskan		TOTAL	
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
1	Jan	-	-	-	-	2,634,000,000	289,740,000
2	Feb					-	-
3	Mar					-	-
4	Apr					-	-
5	Mei					-	-
6	Jun					-	-
7	Jul					-	-
8	Agu					-	-
9	Sep					-	-
10	Okt					-	-
11	Nov					-	-
12	Des					-	-
TOTAL		-	-	-	-	2,634,000,000	289,740,000

Gambar 3. 107 Template Rekapitulasi PPN Tidak Dipungut dan PPN Dibeaskan
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 107 nilai DPP dan PPN untuk “PPN Tidak Dipungut” dan “PPN Dibeaskan” tidak diisi. Karena berdasarkan kolom C No. 3 dan 4, PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan untuk SPT Masa PPN bulan Januari tidak ada atau 0. Sehingga, nilai DPP dan PPN untuk “PPN Tidak Dipungut” dan “PPN Dibeaskan” 0. Kemudian untuk total, merupakan penjumlahan dari “PPN-K”, “PPN-K Gunggung”, “PPN-K Pemungut”, “PPN Tidak Dipungut” dan “PPN Dibeaskan”.

f. Lalu mengisi kolom nilai DPP dan PPN pada “PPN-Masukan”

II. Rekapitulasi Perolehan			
A.	Impor BKP, Pemanfaatan EKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00
B.	Perolehan BKPIJKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	6.800.000.000
C.	Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		6.800.000.000
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		748.000.000
B.	Pajak Masukan Lainnya		
1.	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		3.200.000.000
2.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____/____/____ (mm-yyyy)		0,00
3.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00
4.	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		3.200.000.000
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		3.948.000.000

Gambar 3. 108 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	PPN-M	
		DPP	PPN
1	Jan	6,800,000,000	748,000,000
2	Feb		
3	Mar		
4	Apr		
5	Mei		
6	Jun		
7	Jul		
8	Agu		
9	Sep		
10	Okt		
11	Nov		
12	Des		
TOTAL		6,800,000,000	748,000,000

Gambar 3. 109 *Template* Rekapitulasi PPN Masukan
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 109 nilai DPP “PPN-M” adalah senilai Rp. 6.800.000.000 dan PPN “PPN-M” senilai Rp.748.000.000, angka tersebut berdasarkan SPT Masa PPN bulan Januari bagian II kolom B.

g. Lalu mengisi kolom “Setor/(Kompensasi)”

No	Masa	PPN-K		PPN-K GUNGGUNG		PPN-M		SETOR / (KOMPENSASI)
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	
1	Jan	1,266,000,000	139,260,000	734,000,000	80,740,000	6,800,000,000	748,000,000	(528,000,000)
2	Feb							
3	Mar							
4	Apr							
5	Mei							
6	Jun							
7	Jul							
8	Agu							
9	Sep							
10	Okt							
11	Nov							
12	Des							
TOTAL		1,266,000,000	139,260,000	734,000,000	80,740,000	6,800,000,000	748,000,000	(528,000,000)

Gambar 3. 110 *Template* Rekapitulasi PPN
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3.110 nilai “Setor/(Kompensasi)” status-nya lebih bayar yaitu sebesar Rp. (528.000.000), nilai tersebut diperoleh dari PPN “PPN-K” dijumlah PPN “PPN-K Gunggung” dikurangi PPN “PPN-M”. Status PPN masa Januari lebih bayar karena nilai PPN Masukan lebih besar dibanding nilai PPN Keluaran.

h. Lalu mengisi kolom “Kompensasi” yang diperoleh pada masa sebelumnya.

II. Rekapitulasi Perolehan			
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00
B.	Perolehan BKPIJKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	6.800.000.000
C.	Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		6.800.000.000
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan			
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		748.000.000
B.	Pajak Masukan Lainnya		
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		3.200.000.000
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak, null - null (mm-yyyy)		0,00
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		3.200.000.000
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	3.948.000.000

Gambar 3. 112 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

No	Masa	SETOR /(KOMPENSASI)	KOMPENSASI	TOTAL Setor
1	Jan	(528,000,000)	3,200,000,000	(3,728,000,000)
2	Feb			
3	Mar			
4	Apr			
5	Mei			
6	Jun			
7	Jul			
8	Agu			
9	Sep			
10	Okt			
11	Nov			
12	Des			
TOTAL		(528,000,000)	3,200,000,000	(3,728,000,000)

Gambar 3. 111 Template Rekapitulasi PPN
Sumber: Data Perusahaan


Pada gambar 3.111 nilai “Kompensasi” yang berasal dari masa PPN bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.200.000.000, angka tersebut sesuai dengan bagian III kolom B No. 1. Sehingga “Total Setor” pada masa Januari ini adalah sebesar Rp. (3.728.000.000). Tetapi karena status-nya lebih bayar, maka Rp. 3.728.000.000 tersebut dapat dikompensasikan kembali untuk masa selanjutnya.

i. Kemudian mencocokkan nilai “Total Setor” dari data *excel* dengan SPT pada bagian PPN kurang atau (lebih) bayar.

Berikut tampilan template rekap PPN yang sudah tertera nilai setor-nya:

No	Masa	SETOR / (KOMPENSASI)	KOMPENSASI	TOTAL Setor
1	Jan	(528,000,000)	3,200,000,000	(3,728,000,000)
2	Feb			
3	Mar			
4	Apr			
5	Mei			
6	Jun			
7	Jul			
8	Agu			
9	Sep			
10	Okt			
11	Nov			
12	Des			
TOTAL		(528,000,000)	3,200,000,000	(3,728,000,000)

Gambar 3. 113 *Template* Rekapitulasi PPN
Sumber: Data Perusahaan

AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES		AREA STAPLES	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)										FORMULIR 1111		Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran)					
		Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai												<input type="checkbox"/>		Dilisi oleh Petugas			
NAMA PKP : PT J		NPWP : XXXXXXXXXX										MASA : 01 s.d 01 -2023 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 1 s.d 12					
ALAMAT : XXXXXXXXXX		Masa : 01 s.d 01 -2023 (mm-mm-yyyy)										Thn Buku : 1 s.d 12		Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM					
TELEFON : XXXXXXXXXX		Masa : 01 s.d 01 -2023 (mm-mm-yyyy)										Thn Buku : 1 s.d 12		Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM					
angan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan ra dianggap tidak disampaikan.		I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA										DPP		PPN					
		A. Terutang PPN:										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		1. Ekspor <input type="checkbox"/>										Rp. 2.000.000.000		Rp. 220.000.000					
		2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/>										Rp. 634.000.000		Rp. 69.740.000					
		3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/>										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)										Rp. 2.634.000.000		Rp. 289.740.000					
		B. Tidak Terutang PPN										Rp. 0,00		Rp. 0,00					
		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)										Rp. 2.634.000.000		Rp. 289.740.000					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR										Rp. 220.000.000		Rp. 0,00							
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)										Rp. 220.000.000		Rp. 0,00							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan										Rp. 3.948.000.000		Rp. 3.948.000.000							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)										Rp. 3.728.000.000		Rp. 3.728.000.000							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)										Rp. 0,00		Rp. 0,00							
G. PPN kurang bayar diunasi tanggal										Rp. 0,00		Rp. 0,00							

Gambar 3. 114 SPT Masa PPN periode Januari 2024
Sumber: Data Perusahaan

Berdasarkan gambar 3.114 PPN kurang atau (lebih) bayar pada bagian II kolom D senilai Rp. (3.728.000.000), nilai tersebut sesuai dengan nilai total setor pada data *excel*. Maka, rekapitulasi yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan data SPT.

3.3.9 Melakukan ekualisasi hutang PPh Pasal 21.

Tujuan dilakukan ekualisasi PPh Pasal 21 adalah untuk menyamakan perlakuan perpajakan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik itu pegawai tetap maupun tidak tetap, serta memastikan kewajiban pajak yang lebih adil. Ekualisasi ini bertujuan agar penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menghindari adanya perbedaan perlakuan antara berbagai jenis penghasilan atau status karyawan dalam hal pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21. Unit usaha yang dilakukan ekualisasi hutang PPh Pasal 21 adalah PT I dilakukan pada periode bulan Oktober 2024. Dokumen yang diperlukan yaitu *excel general trial balance* per Desember 2023 dan September 2024 dan template ekualisasi PPh Pasal 21,

Berikut langkah-langkah melakukan ekualisasi hutang PPh Pasal 21 PT I periode September 2024:

- a. Mendapatkan *excel general trial balance* per Desember 2023 dan September 2024.

Ranges Period		: 01.12.2023 - 31.12.2023				
Business Area	Profit Center	Cost Cent	Account No			
AN01			2021000			-558.456.500
				Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)		
AN01			2021020			-38.743.453
				PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)		
AN01			2021030			0
				PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		
AN01			2021050			647.560.076
				PPh 21 Kas Negara		
AN01			2021100			-175.240.000
				PPh 21 Final (Wapu)		
AN01			2021150			175.240.000
				PPh 21 Final Kas Negara		

Gambar 3. 115 *Excel General Trial Balance* Desember 2023
Sumber: Data Perusahaan

Ranges Period		: 01.09.2024 - 30.09.2024	
Business Area		: AN01	
Business Area	Profit Center	Cost Cent	Account No
AN01			2021000 -1.038.300.886
			Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)
AN01			2021020 -71.563.846
			PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)
AN01			2021030 -788.25
			PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)
AN01			2021050 1.094.597.305
			PPh 21 Kas Negara
AN01			2021150 259.598.007
			PPh 21 Final Kas Negara

Gambar 3. 116 Excel General Trial Balance September 2024
Sumber: Data Perusahaan

b. Memasukan data di *general trial balance* ke *template* ekualisasi.

Ranges Period		: 01.12.2023 - 31.12.2023	
Business Area		: AN01	
Business Area	Account No		
AN01	2021000	-558.456.500	
	Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)		
AN01	2021020	-38.743.453	
	PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)		
AN01	2021030	0	
	PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		
AN01	2021050	647.560.076	
	PPh 21 Kas Negara		

1 Januari - September 2024		Ekualisasi Hutang PPh 21	
ACCOUNT ID.	DESCRIPTION	BEGINNING BAL.	
2021000	Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)	(558.456.500)	
2021020	PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)	(38.743.453)	
2021030	PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		
2021050	PPh 21 Kas Negara	647.560.076	
	Total	50.360.123	
	SSP Des'23		9.320.501
	Selisih		59.680.624
	LB		59.585.752
			94.872

Gambar 3. 117 General Trial Balance dan Template Ekualisasi
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 117 tertera total dari *beginning balance* sebesar Rp. 50.360.123 kemudian untuk nominal SSP Des'24 dan LB (Lebih Bayar) nominalnya diberikan oleh *senior staff*. Lalu untuk *beginning balance* tahun 2023 masih terdapat selisih sebesar Rp. 94.872.

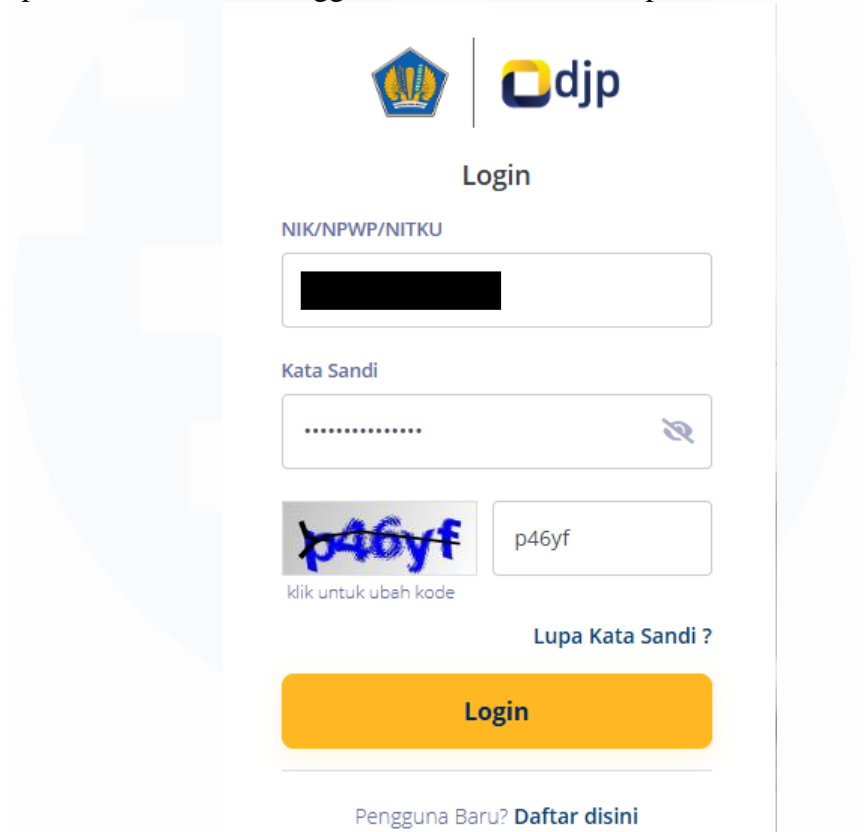
Ranges Period		: 01.09.2024 - 30.09.2024	
Business Area		: AN01	
Business Area	Account No		
AN01	2021000	-1.038.300.886	
	Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)		
AN01	2021020	-71.563.846	
	PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)		
AN01	2021030	-788.25	
	PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		
AN01	2021050	1.094.597.305	
	PPh 21 Kas Negara		

3 PPh 21		ENDING BALANCE		Adjustment Journal		ENDING BALANCE	
DESCRIPTION	ENDING BALANCE	D	K				
Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)	(1.038.300.886)					(1.038.300.886)	
PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)	(71.563.846)					(71.563.846)	
PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)	(788.250)					(788.250)	
PPh 21 Kas Negara	1.094.597.305					1.094.597.305	
Total	(16.055.677)					(16.055.677)	

Gambar 3. 118 General Trial Balance dan Template Ekualisasi
Sumber: Data Perusahaan

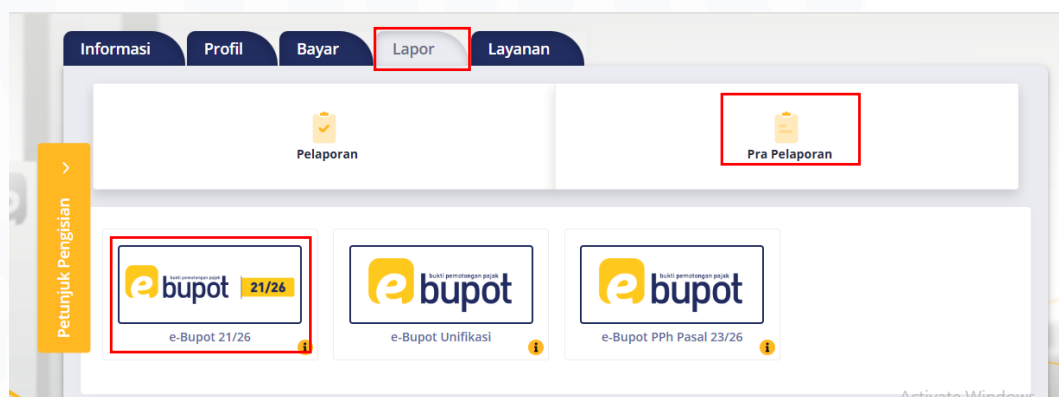
Pada gambar 3. 118 tertera total dari *ending balance* sebesar Rp. 16.055.667.

- c. Melihat nilai SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 21 per September 2024 pada laman DJP, sehingga masuk ke laman DJP perusahaan:



Gambar 3. 119 Tampilan *Login* DJP
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

- d. Lalu masuk ke menu “Lapor” dan klik “Pra Pelaporan”. Kemudian masuk ke menu e-Bupot 21/26.



Gambar 3. 120 Tampilan menu “Lapor” pada DJP *Online*
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

- e. Kemudian pada menu “Dashboard” klik “Liat SPT” pada masa pajak September.



Gambar 3. 121 Tampilan menu “Dashboard” pada DJP Online
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

- f. Kemudian pindahkan angka SSP pada kolom No. 15.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) SETOR			JUMLAH (Rp)
11a	PPh Pasal 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH		0
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	B.01	0
13	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Keterangan :	B.02 <input type="text"/> B.03	0
14	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)	B.04	0
15	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)	B.05	48.575.538
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETORKAN			
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)	B.06	0
17	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)	B.07	0
18	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPERSIKAN KE MASA PAJAK (mm-yyyy)	B.08	-

Gambar 3. 122 SSP PPh Pasal 21 bulan September 2024
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

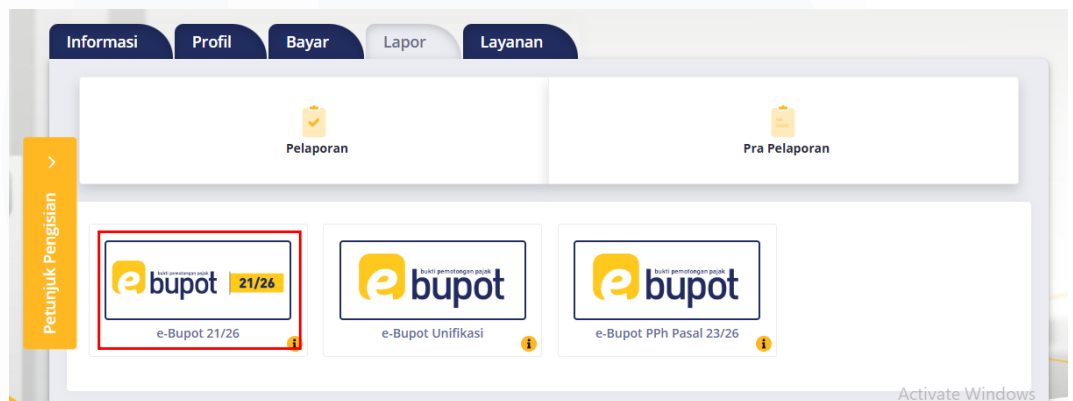
Pada gambar 3. 122 tertera SPP PPh Pasal 21 bulan September 2024 sebesar Rp. 48.575.538. Kemudian memasukan angka tersebut dalam *template excel* sebagai berikut:

DESCRIPTION	BEGINNING BAL.	ENDING BALANCE	Adjustment Journal		ENDING BALANCE
			D	K	
Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)	(558.456.500)	(1.038.300.886)			(1.038.300.886)
PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)	(38.743.453)	(71.563.846)			(71.563.846)
PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		(788.250)			(788.250)
PPh 21 Kas Negara	647.560.076	1.094.597.305			1.094.597.305
Total	50.360.123	(16.055.677)			(16.055.677)
SSP Des'23	9.320.501			SSP Sep'24	(48.575.538)
Selisih	59.680.624			Selisih	32.519.861
LB	59.585.752				
	94.872				

Gambar 3. 123 Template ekualisasi PPh Pasal 21
Sumber: Data Perusahaan

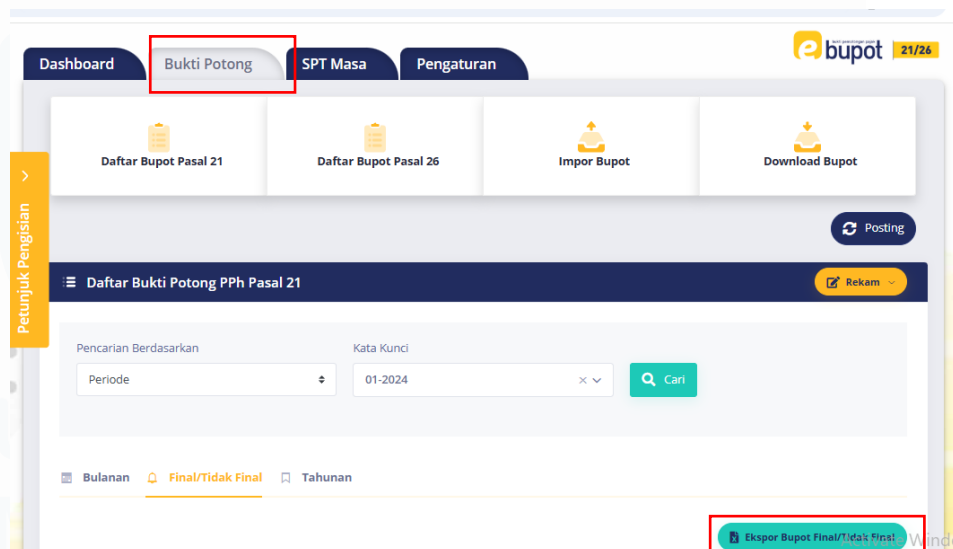
Pada gambar 3. 123 tertera total ending balance Rp. 16.055.677, sedangkan pada SSP Sep'24 sebesar Rp. 48.575.538. Maka, masih terdapat selisih sebesar Rp. 32.519.861.

- g. Kemudian karena terdapat selisih maka perlu dicari selisihnya, dengan cara menyamakan nilai di *SAP* dengan bukti potong.
- h. Lalu men-*download* file bukti potong pada menu “e-Bupot 21/26”.



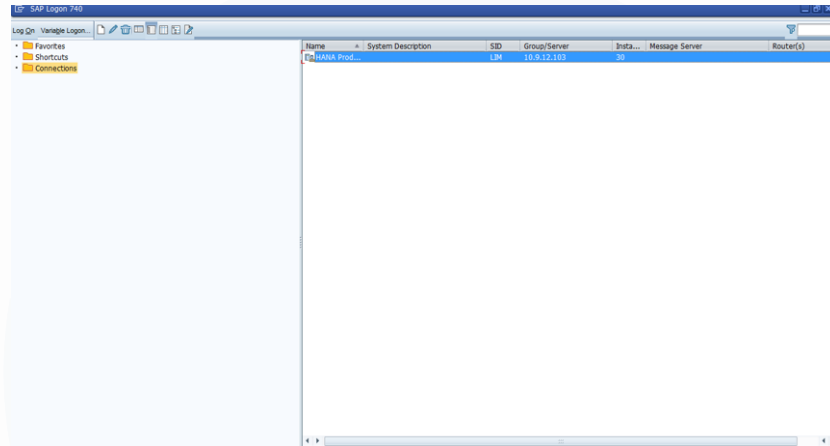
Gambar 3. 124 Tampilan menu “Lapor” pada DJP Online
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

- i. Kemudian pada menu “Bukti Potong” masukan periode per bulan-nya dari Januari hingga September 2024 dan kemudian klik “Ekspor Bupot Final/Tidak Final”, lalu file akan tersimpan.



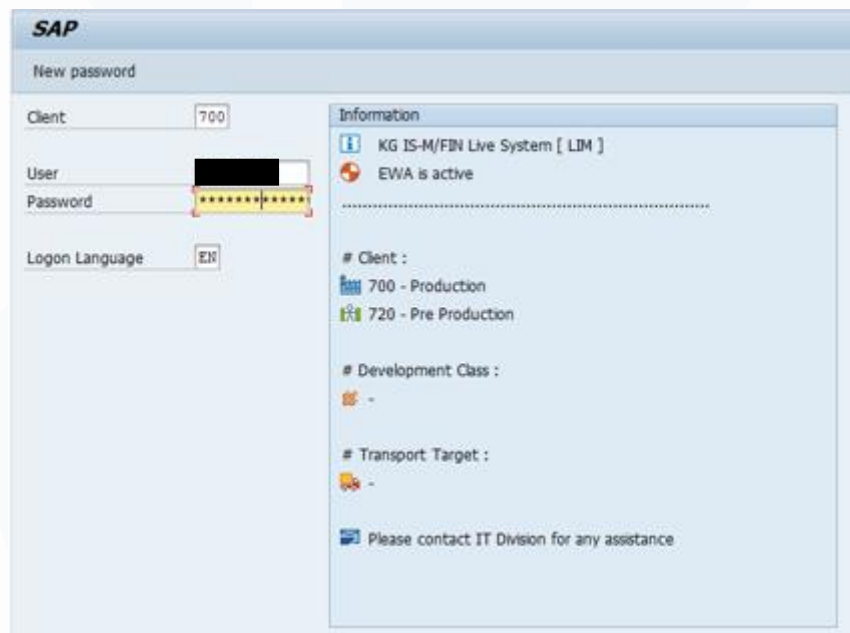
Gambar 3. 125 Tampilan “e-bupot 21/26” pada DJP Online
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

- j. Kemudian men-download data dari SAP, buka software SAP dan klik pada bagian pertama.



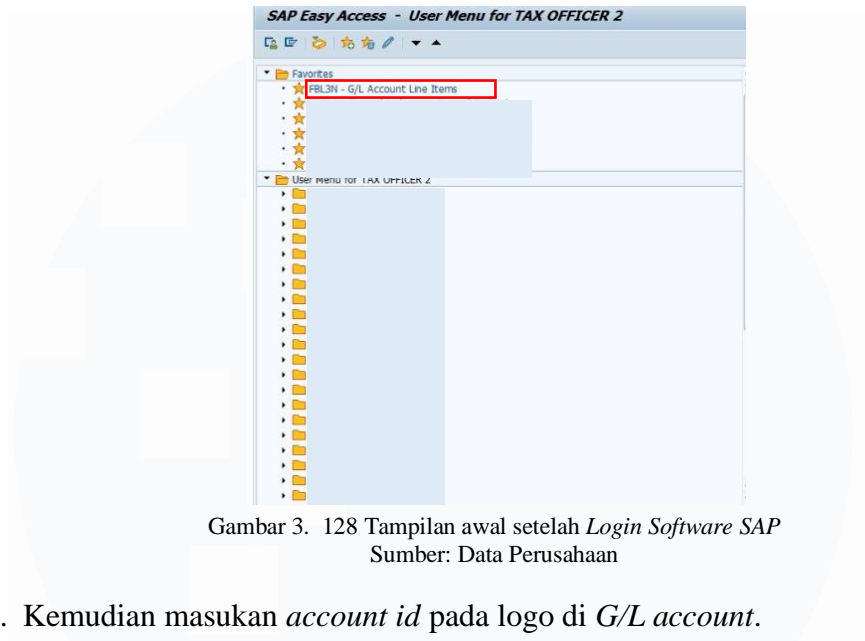
Gambar 3. 126 Tampilan awal software SAP
Sumber: Data Perusahaan

- k. Kemudian masukan “User” dan “Password” perusahaan.



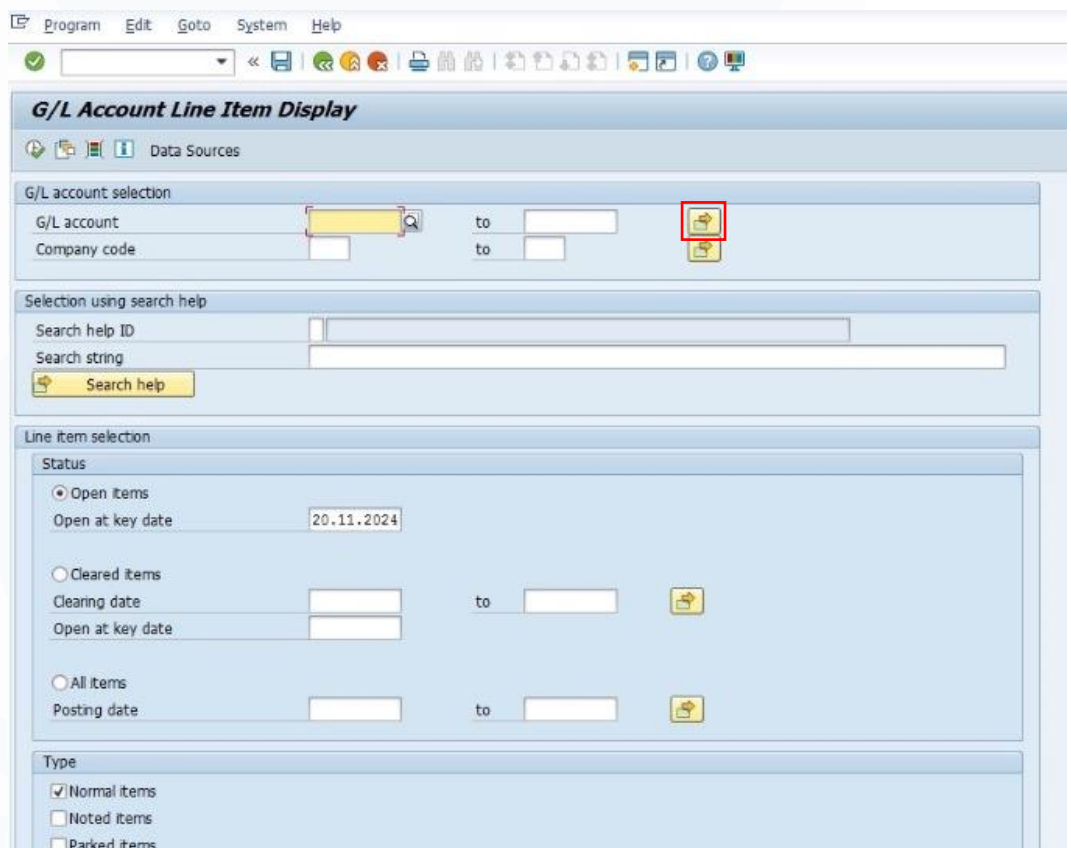
Gambar 3. 127 Tampilan Login software SAP
Sumber: Data Perusahaan

1. Masuk ke menu “FBL3N” kemudian klik *enter*.



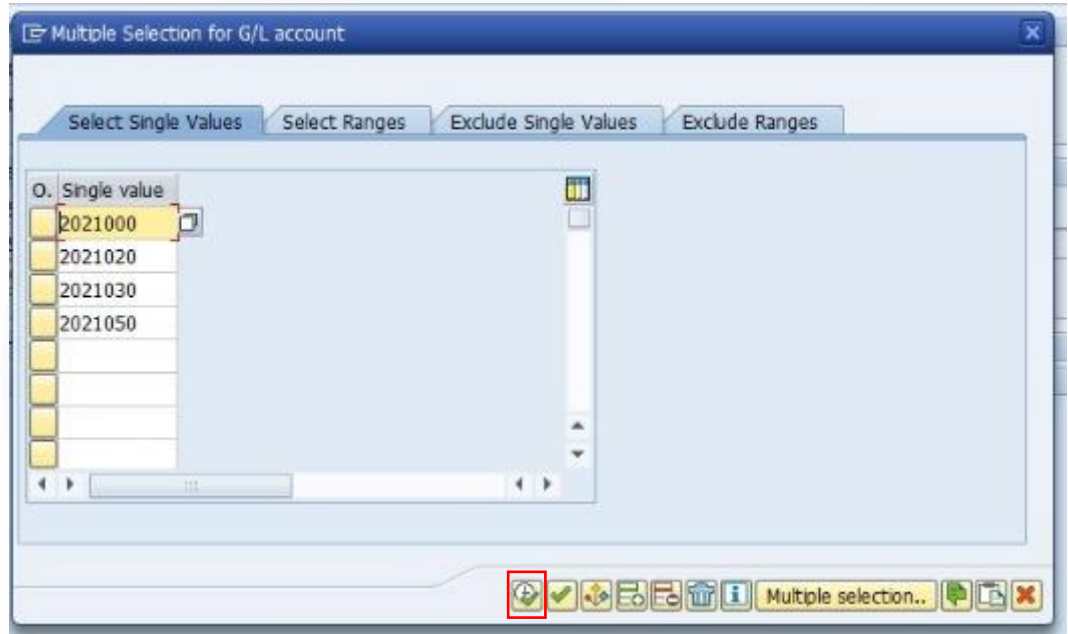
Gambar 3. 128 Tampilan awal setelah Login Software SAP
Sumber: Data Perusahaan

- m. Kemudian masukan *account id* pada logo di *G/L account*.



Gambar 3. 129 Tampilan “G/L Account Line Item” pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

- n. Setelah itu *copy account id* yang berasal dari data *general trial balance*, kemudian klik logo yang di tandai merah.



Gambar 3. 131 Tampilan “Multiple Selection for G/L account” pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

Business Area	Profit Center	Cost Cent	Account No	
AN01			2021000	-1.038.300.886
			Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)	
AN01			2021020	-71.563.846
			PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)	
AN01			2021030	-788.25
			PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)	
AN01			2021050	1.094.597.305
			PPh 21 Kas Negara	

Gambar 3. 130 Excel General Trial Balance September 2024
Sumber: Data Perusahaan

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

- o. Setelah itu masukan “Company Code” perusahaan.

G/L account selection

G/L account 2021000 to

Company code

Selection using search help

Search help ID

Search string

Search help

Line item selection

Status

Open items

Open at key date 20.11.2024

Cleared items

Clearing date to

Open at key date

All items

Posting date to

Type

Normal items

Noted items

Parked items

COMPTR-2PCFY

Gambar 3. 132 Tampilan “G/L Account Line Item” pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

- p. Lalu masukan “Posting date” yaitu dari 1 Januari 2024 hingga 30 September 2024, kemudian klik logo yang ditandai warna merah.

G/L Account Line Item Display

Data Sources

Selection using search help

Search help ID

Search string

Search help

Line item selection

Status

Open items

Open at key date 20.11.2024

Cleared items

Clearing date to

Open at key date

All items

Posting date 01.01.2024 to 30.09.2024

Type

Normal items

Noted items

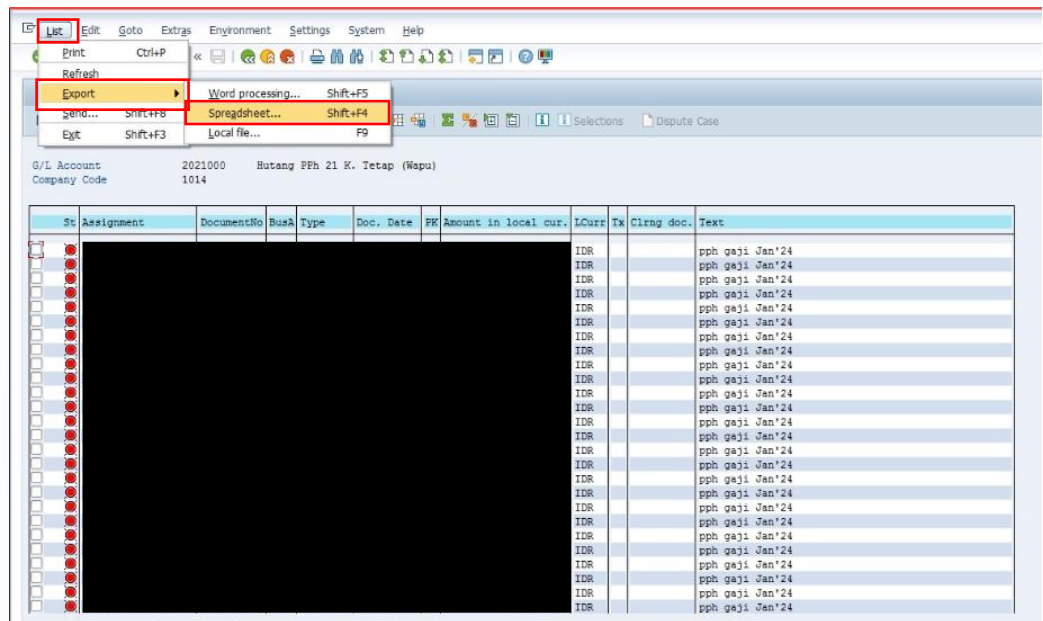
Parked items

List Output

Active

Gambar 3. 133 Tampilan “G/L Account Line Item” pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

q. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini:



Gambar 3. 134 Detail G/L Account pada SAP
Sumber: Data Perusahaan

Lalu untuk menyimpan dalam bentuk *file excel*, klik “List”, “Export”, kemudian “Spreadsheet”.

r. Setelah mendapat data dari SAP dan bukti potong yang berasal dari DJP, maka mencocokkan kedua data tersebut apakah sudah cocok.

17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000013
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000014
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000015
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000016
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50	-7.500	IDR	1302240000017
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50	-7.500	IDR	1302240000018
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50	-7.500	IDR	1302240000019
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000020
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000021
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000022
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000023
17000000992024	1700000099	AN01	KR	16/02/2024	50		IDR	1302240000024

Gambar 3. 136 Data PPh Pasal 21 berdasarkan SAP
Sumber: Data Perusahaan

NO_BUKTI_POTONG	NAMA_PE	PENGHASI	PPH_DIPO	KODE_OBJ	PASAL	MASA_PA	TAHUN_PA	STATUS	REV_NO	POSTING
1302240000022				21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000021				21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000020				21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000019		150000	7500	21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000018		150000	7500	21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000017		150000	7500	21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000016				21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah
1302240000015				21-100-13	PPH21	02	2024	Normal	0	Sudah

Gambar 3. 135 Data PPh Pasal 21 berdasarkan Bukti Potong
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Kemudian pada gambar 3. 135 yang menunjukkan data pada bukti potong dan gambar 3. 136 yang menunjukkan data dari SAP, terdapat nilai transaksi yang sama. Lalu, untuk data-data yang tidak ada di butik potong Namun ada di SAP atau sebaliknya, dibuatkan listnya karena jika data tidak ada di bukti potong atau SAP akan menyebabkan timbulnya selisih.

- s. Kemudian jika ada data yang tidak sesuai, maka di list untuk mencari penyebab selisih antara nilai *ending balance* di *general trial balance* dengan SSP (Surat Setoran Pajak) pada masa September.

Kas Negara			
	Bupot	SAP	Selisih
Des	9.	9.	94.872
Jan	4	45.	-
Feb	53.	53	(88)
Mar	172.	172	(98)
Apr			-
Mei	27.	27	-
Jun	50.	50	-
Jul	37.	37	-
Agu	51.	51	-
	447.	446.	94.686
Pekerja Bebas			
Tidak ada di Bupot			
Feb	1.3.02.	-90.	
	1.3.02.	-97.	
	1.3.02.	-150.	
	1.3.02.	-127.000	
		(465.000)	
Tidak ada di SAP			
Mei			8974
Agu		750	
		750	
		825	
		750.000	
		307.500	
Karyawan Tetap			
	Bupot	SAP	Selisih
Jan	44.	(44.	(139.003) < di SAP tercatat di bupot tidak
Feb	50.	(49.	878.876 < di bupot tercatat di SAP tidak
Mar	169.	(137.	31.500.101
Apr	43.	(43.	(74)
Mei	40.	(40.	(67)
Jun	49.	(49.	(72)
Jul	36.	(36.	(48)
Agu	40.	(40.	(49)
Sep	36	(36	(51)
	512.	(479.	32.239.613
Tenaga Ahli			
	Bupot	SAP	Selisih
Mar	500.0	500.0	-
Apr	38	38.	-
Sep	250	250	-
	788.0	788.0	-

Gambar 3. 137 Rincian Selisih pada *Template* Ekualisasi PPh Pasal 21
Sumber: Data Perusahaan

- t. Setelah itu, total jumlah perbedaan antara SAP dengan bukti potong yang berasal dari DJP dijumlahkan dan kemudian disesuaikan dengan SSP. Pada PPh Pasal 21 PT I, masih terdapat selisih sebesar Rp. 440, tetapi angka tersebut termasuk *immaterial*. Karena hal itu, penyebab selisih pada masa September akan terlihat.

ACCOUNT ID.	DESCRIPTION	BEGINNING BAL.	NET CHANGE	ENDING BALANCE	D	K	ENDING BALANCE
2021000	Hutang PPh 21 K. Tetap (Wapu)	(558.456.500)	(479.844.386)	(1.038.300.886)			(1.038.300.886)
2021020	PPh 21 Pek. Bebas (Wapu)	(38.743.453)	(32.820.393)	(71.563.846)			(71.563.846)
2021030	PPh 21 Tenaga Ahli (Wapu)		(788.250)	(788.250)			(788.250)
2021050	PPh 21 Kas Negara	647.560.076	447.037.229	1.094.597.305			1.094.597.305
	Total	50.360.123	Total	(16.055.677)			(16.055.677)
	SSP Des'23	9.320.501				SSP Sep'24	(48.575.538)
	Selisih	59.680.624				Selisih	32.519.861
	LB	59.585.752					
		94.872					
	Penyebab selisih						
	Karyawan Tetap	32.239.613					
	Tenaga Ahli	-					
	Kas Negara	94.686					
	Pekerja Bebas	185.122					
		32.519.421					
	Nilai selisih antara End Bal dgn SSP Sep'24						32.519.861
							(440)

Gambar 3. 138 Template Ekualisasi PPh Pasal 21
Sumber: Data Perusahaan

Pada gambar 3. 138 tertera penyebab terjadinya selisih karena adanya data yang tidak sesuai antara bukti potong dengan SAP pada akun karyawan tetap, tenaga ahli, kas negara, pekerja bebas adalah senilai Rp 32.519.421. Kemudian selisih antara total *ending balance* dengan SSP Sep'24 sebesar Rp. 32.519.861. Maka, masih terdapat selisih senilai Rp. 440, tetapi angka tersebut termasuk *immaterial* bagi Perusahaan.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Terdapat beberapa kendala yang terjadi selama proses kerja magang di Kompas Gramedia, yaitu:

1. Pada saat melakukan pekerjaan, komputer perusahaan seringkali *error* atau *not responding* sehingga menyebabkan tertundannya pekerjaan bahkan hingga hilang pekerjaan yang terakhir kali dikerjakan.
2. Pada saat menginput faktur pajak PPN Masukan terdapat *QR Code* yang tidak terbaca oleh *scanner*.
3. Pada saat menginput bukti potong Wajib Bayar terdapat beberapa unit usaha yang tidak *valid* dan ada unit usaha baru yang belum terintegrasi pada *software BB Desktop*.

4. Pada saat melakukan impor aset pada SPT Tahunan Badan terkadang terjadi *error* karena adanya data yang tidak sesuai dengan aturan impor yang telah ditetapkan oleh DJP.
5. Saat menyusun daftar nominatif, ada beberapa NPWP Wajib Pajak tidak ada.
6. Pada saat ingin melaporkan SPT Tahunan Badan, kode verifikasi tidak terdapat pada *email* perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat kegagalan dalam pelaporan SPT karena SPT yang digunakan adalah SPT versi lama sehingga harus dilakukan penginputan kembali dari awal.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Beberapa solusi yang dapat diberikan selama proses pelaksanaan kerja magang di Kompas Gramedia, yaitu:

1. Solusi saat komputer perusahaan yang mengalami *error* yaitu dengan melakukan *restart* pada komputer tersebut atau pindah ke *device* komputer lainnya. Selain itu, perusahaan bisa melakukan pembaharuan pada *software* komputer kantor.
2. Solusi saat menginput faktur pajak PPN Masukan pindai terdapat *QR Code* yang tidak terbaca oleh *scanner* adalah menginput faktur pajak Masukan tersebut secara manual.
3. Solusi saat menginput bukti potong Wajib Bayar yang tidak *valid* yaitu dengan mencari kode unit usaha secara manual di *software BB Desktop*. Kemudian untuk kode unit usaha baru yang belum terintegrasi pada *BB Desktop* dapat dikomunikasikan dengan senior staff mengenai kode unit usaha tersebut.
4. Solusi saat menginput SPT Tahunan Badan mengenai *error* saat melakukan impor aset yaitu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan aturan DJP atau belum.

5. Solusi saat NPWP pada daftar nominatif tidak terlihat, maka NPWP bisa dilihat dari daftar nominatif tahun lalu atau dikomunikasikan dengan senior staff.
6. Solusi saat melapor SPT Tahunan Badan namun tidak terdapat kode verifikasi pada *email* perusahaan yaitu dengan mengkomunikasikan dengan senior staff, apakah terdapat kode verifikasi pada *email* lain. Kemudian untuk kegagalan dalam pelaporan, perusahaan dapat melakukan pembaharuan terhadap *software* komputer sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan.

